



BAHAN AJAR PERTEMUAN 9

Periode 1950 - Masa Sekarang

1957: Perjanjian-Perjanjian Roma

Republik Federal Jerman termasuk di antara enam negara yang menandatangani perjanjian pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa di Roma. →

Uni Eropa

European Union	
 <p>(Bendera Uni Eropa)</p>	
<p><u>Motto</u>: <i>In varietate concordia</i> (<u>Bahasa Latin</u>: <i>Persatuan dalam perbedaan</i>)</p>	
<p><u>Lagu kebangsaan</u>: <u>Ode an die Freude</u> (orkestral)</p>	
	
<u>Ibu kota</u>	<u>Brusel</u>
<u>Parlemen</u>	Brusel, <u>Strasbourg</u> dan <u>Kota Luxemburg</u>
<u>Bahasa resmi</u>	Lihat <u>Bahasa-bahasa resmi Uni Eropa</u>
<u>Presiden Dewan</u>	<u>Herman van Rompuy</u> (<u>Belgia</u>)
<u>Presiden Komisi</u>	<u>José Manuel Durão Barroso</u>
<u>Presiden Parlemen</u>	<u>Hans Gert Pottering</u>
<u>Wilayah</u> - Total	<u>Urutan ke-7²</u> 4,422,773 <u>km²</u>
<u>Penduduk</u> - Total (2004) - <u>Kepadatan</u>	<u>Urutan ke-3²</u> 454.900.000 (EU-25) 116,4 jiwa/ <u>km²</u>

<u>PDB (PPP)</u> (2004) - Total - Per kapita	<u>Urutan ke-2²</u> €10.202.336.800.000 <u>[1]</u> €22.300 <u>[2]</u>
<u>Didirikan</u> Sebagai <u>KE</u> - Ditandatangani - Diberlakukan Sebagai UE - Ditandatangani - Diberlakukan	<u>Persetujuan Roma</u> - <u>25 Maret 1957</u> - <u>1 Januari 1958</u> <u>Persetujuan Maastricht</u> - <u>7 Februari 1992</u> - <u>1 November 1993</u>
<u>Mata uang</u>	<u>Euro</u> (EUR atau €)
<u>Zona waktu</u>	<u>UTC</u> hingga +2
<u>TLD</u>	<u>.eu</u> (berlaku mulai 2005); level kedua <u>.eu.int</u> sudah digunakan
<u>Kode telepon</u>	+3 (direncanakan)
¹ Setiap negara bisa menetapkan bahasa lainnya dalam setiap wilayahnya. ² Jika dihitung sebagai satu negara.	

Uni Eropa (UE, bahasa Inggris: European Union atau EU) adalah sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah *Perjanjian Uni Eropa* (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari EU timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke tahun 1950-an.

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.

Anggota

Sejak 2007 Uni Eropa memiliki 27 negara anggota, yaitu

- Swedia (sejak 1 Januari 1995)
- Finlandia (sejak 1 Januari 1995)
- Estonia (sejak 1 Mei 2004)
- Latvia (sejak 1 Mei 2004)
- Lituania (sejak 1 Mei 2004)
- Polandia (sejak 1 Mei 2004)
- Denmark (sejak 1973)

- [Jerman](#) (sejak permulaan)
- [Belanda](#) (sejak permulaan)
- [Belgia](#) (sejak permulaan)
- [Luksemburg](#) (sejak permulaan)
- [Irlandia](#) (sejak 1973)
- [Britania Raya](#) (sejak 1973)
- [Perancis](#) (sejak permulaan)
- [Portugal](#) (sejak 1986)
- [Spanyol](#) (sejak 1986)
- [Italia](#) (sejak permulaan)
- [Malta](#) (sejak 1 Mei 2004)
- [Austria](#) (sejak 1 Januari 1995)
- [Slovenia](#) (sejak 1 Mei 2004)
- [Republik Ceko](#) (sejak 1 Mei 2004)
- [Slowakia](#) (sejak 1 Mei 2004)
- [Hongaria](#) (sejak 1 Mei 2004)
- [Yunani](#) (sejak 1981)
- [Siprus](#) selatan (sejak 1 Mei 2004)
- [Bulgaria](#) (sejak 1 Januari 2007)
- [Rumania](#) (sejak 1 Januari 2007)

[Kroasia](#) kelak akan jadi anggota pula. Status [Turki](#) masih belum jelas. [Parlemen Eropa](#) berunding di [Brusel](#), Belgia dan (beberapa kali setahun) di Strasbourg (Perancis).

[Parlemen Eropa](#) dipilih secara langsung oleh penduduknya.

Awal dan sejarah



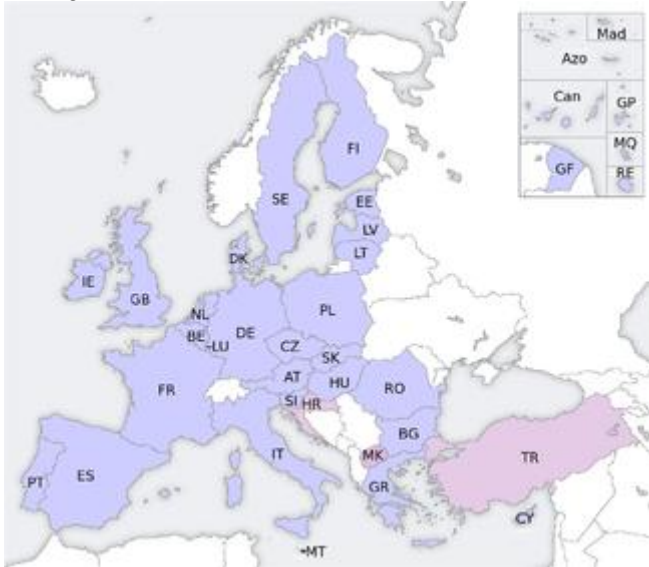
Acara penandatanganan Perjanjian Roma, 1957

Percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern; mereka telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. Tiga ribu tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa [Celt](#), dan kemudian ditaklukan dan diperintah [Kekaisaran Roma](#) yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran [Franks](#) dari [Charlemagne](#) dan [Kekaisaran Suci Roma](#) menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun. Belakangan pada 1800-an [customs union](#) di bawah [Napoleon I Prancis](#) dan penaklukan pada 1940-an oleh [Nazi Jerman](#) hanya terjadi sementara saja.

Dikarenakan koleksi [bahasa Eropa](#) dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan [pendudukan](#) dari negara yang tidak bersedia, menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama dan persamaan anggota dibuat oleh [pasifis Victor Hugo](#) pada [1851](#). Setelah [Perang Dunia I](#) dan [Perang Dunia II](#), keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali

Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah [European Coal and Steel Community](#) oleh [Jerman](#), [Perancis](#), [Italia](#), dan negara-negara [Benelux](#). Hal ini terjadi oleh [Perjanjian Paris \(1951\)](#), ditandatangani pada April [1951](#) dan dimulai pada Juli [1952](#). Setelah itu terbentuk juga [European Economic Community](#) didirikan oleh [Perjanjian Roma](#) pada [1957](#) dan diimplementasikan pada [1 Januari 1958](#). Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi **Masyarakat Eropa** yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Kebijakan utama



Peta negara-negara anggota UE ([ISO 3166](#))

Dari pergantian namanya dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" hingga ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam UE.

Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.

Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah [Committee of the Regions](#) didirikan sebagai bagian dari [Perjanjian Maastricht](#).

Kedua, kebijakan UE mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.

- Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada [Komisi Eropa](#) kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya [undang-undang kompetisi](#), kontrol [Bantuan Negara](#) dan [liberalisasi](#).
- Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui [proses legislatif UE](#), yang melibatkan [Komisi Eropa](#), [Parlemen Eropa](#) dan [Dewan Uni Eropa](#). Akibat dari hal ini [hukum Uni Eropa](#) semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.
- Ko-operasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai [Dewan Uni Eropa](#) sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.

Ketegangan antara UE dan kompetensi nasional (atau sub-nasional) bertahan lama dalam perkembangan Uni Eropa. (*Lihat pula [Antar-pemerintahanisme vs. Supra-nasionanisme](#) (atas), [Eroskeptisisme](#).*)

Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai [Acquis Communautaire](#). (*Lihat pula [Perhimpunan Perdagangan Bebas Eropa](#) (EFTA), [Wilayah Ekonomi Eropa](#) (EEA) and [Langit Tunggal Eropa](#).*) Lihat [tabel negara](#) yang ikut serta dalam sejumlah inisiatif.

Kebijakan eksternal

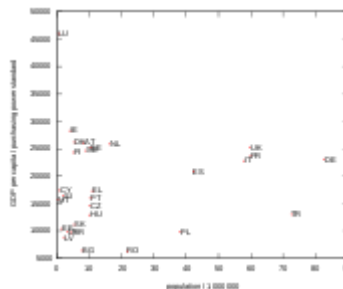
- Suatu tarif eksternal bersama [bea cukai](#), dan posisi yang sama dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional.

- Pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara [Eropa Timur](#) lainnya, serta bantuan ke banyak negara berkembang melalui program Phare and Tacis-nya.
- Pembentukan sebuah pasar tunggal Masyarakat Energi Eropa melalui [Perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara](#)

Kerja sama dan harmonisasi di wilayah-wilayah lain

- Kebebasan bagi warga UE untuk ikut memilih dalam pemilihan pemerintahan setempat dan [Parlemen Eropa](#) di negara anggota manapun juga.
- Kerja sama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi [intelijen](#) (melalui [EUROPOL](#) dan [Sistem Informasi Schengen](#)), perjanjian tentang definisi bersama mengenai [kejahatan](#) dan prosedur-prosedur [ekstradisi](#).
- Suatu [kebijakan luar negeri bersama](#) sebagai sebuah sasaran masa depan, namun demikian hal ini masih lama baru akan terwujud. Pembagian antara negara-negara anggota (dalam [surat delapan](#)) dan anggota-anggota yang saat itu belum bergabung (dalam [surat Vilnius](#)) pada saat [penyerbuan Irak 2003](#) menyoroti seberapa jauh sasaran ini berada di depan sebelum ia dapat menjadi kenyataan.
- Suatu [kebijakan keamanan bersama](#) sebagai suatu sasaran, termasuk pembentukan [Satuan Reaksi Cepat Eropa](#) dengan 60.000 anggota untuk maksud-maksud [memelihara perdamaian](#), seorang staf [militer](#) UE dan sebuah pusat [satelit](#) UE (untuk maksud-maksud intelijen).
- Kebijakan bersama tentang asilum dan imigrasi.
- Pendanaan bersama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, melalui Rancangan Program untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi selama empat tahun. [Rancangan Program Keenam](#) berlaku dari 2002 hingga 2006.

Ekonomi



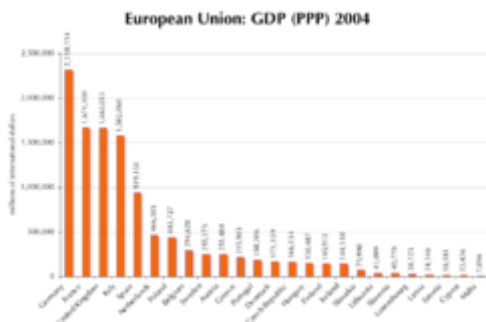
Penduduk dan PDB per kapita negara-negara anggota dan kandidat Uni Eropa Bila dianggap sebagai satu kesatuan, Uni Eropa memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan [GDP 2004](#) 11.723.816 [PPP](#). Ekonomi UE diharapkan tumbuh lebih jauh dalam dekade berikutnya sejalan dengan lebih banyak negara bergabung dalam persatuan ini - dan terlebih lagi negara-negara baru ini biasanya lebih miskin dari rata-rata UE, dan oleh karena itu diharapkan pertumbuhan GDP yang cepat akan membantu dinamika Uni Eropa. Meskipun begitu UE hanya akan tumbuh sekitar 0,3% pada kuartar 2 2005 [1](#), sedangkan negara [industri](#) lainnya seperti Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,2%.

Standar hidup

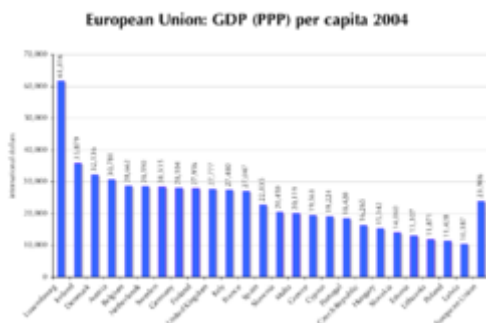
Berikut adalah sebuah tabel dan tiga graf menunjukkan [GDP](#) (PPP) per kapita dan GDP nominal per kapita untuk Uni Eropa dan anggotanya. Data ini untuk perkiraan tahun 2005 dan grafnya dari tahun 2004.



GDP (PPP) per kapita 2004 menunjukkan negara-negara di atas dan bawah rata-rata UE



GDP (PPP), 2004



GDP (PPP) per kapita, 2004

Negara anggota	PDB (PPP) juta dolar int.	PDB (PPP) per kapita dolar int.	PDB (nominal) per kapita dolar int.
Uni Eropa	12.329.110	26.900	29.203
 Luksemburg	30.674	66.821	73.147
 Republik Irlandia	164.190	40.003	48.753
 Denmark	187.721	34.718	46.691
 Austria	267.053	32.802	37.688
 Belgia	324.299	31.159	35.068
 Finlandia	161.099	30.818	36.522
 Belanda	498.703	30.574	38.180
 Britania Raya	1.825.837	30.227	36.429
 Jerman	2.498.471	30.150	33.785

 Swedia	267.427	29.537	39.101
 Italia	1.694.706	29.218	29.635
 Perancis	1.811.561	29.019	33.855
 Spanyol	1.026.340	24.803	27.175
 Slovenia	43.260	21.695	18.527
 Yunani	236.311	21.529	20.006
 Siprus	16.745	20.669	20.866
 Malta	7.909	20.015	13.742
 Ceko	198.976	19.488	11.929
 Portugal	203.947	19.388	16.525
 Hongaria	162.289	16.627	11.059
 Estonia	22.239	16.461	9.424
 Slowakia	87.129	16.110	8.549
 Lituania	49.106	14.338	7.268
 Polandia	512.890	13.440	7.487
 Latvia	30.227	13.059	6.793
 Bulgaria	71,381	9,205	3.328
 Rumania	183,162	8,258	3.603
Negara Kandidat	GDP (PPP) juta <i>dolar int.</i>	GDP (PPP) per kapita <i>dolar int.</i>	GDP (nominal) per kapita <i>dolar int.</i>
 Kroasia	55.638	12.364	8.416
 Turki	570.748	7.958	4.925

Sumber: [CIA World Factbook \[3\]](#)

All other figures, source: [IMF](#) web site ([2005 GDP PPP](#), [2005 per capita GDP PPP](#), [2005 per capita GDP, current prices](#)).

Perbandingan dengan blok-blok/negara-negara lain

Blok	Luas km ²	Penduduk	GDP (PPP) juta \$US	GDP (PPP) per kapita \$US	Negara anggota
Uni Eropa	4,422,773	456.285.839	11.064.752	24.249	25
ASEAN	4.400.000	553.900.000	2.172.000	4.044	10
CSN	17.715.335	366.669.975	2.635.349	7.187	12
NAFTA	21.588.638	430.495.039	12.889.900	29.942	3
AU	29.797.500	850.000.000	1.515.000	1.896	53
Negara besar					Pembagian politik
India	3.287.590	1.102.600.000	3.433.000	3.100	35

Republik Rakyat Cina	9.596.960	1.306.847.624	7.249.000	5.200	33
AS ¹	9.631.418	296.900.571	11.190.000	39.100	50
Kanada ¹	9.984.670	32.507.874	958.700	29.800	13
Rusia	17.075.200	143.782.338	1.282.000	8.900	89

Pada tahun 2003. Warna cyan untuk angka terbesar, hijau untuk yang terkecil.

Sumber: CIA World Factbook 2004, IMF

¹ Anggota [NAFTA](#)

Nama Uni Eropa dalam bahasa-bahasa Eropa

Berikut merupakan nama "Uni Eropa" dalam 23 bahasa resmi yang digunakan di Uni Eropa. [\[1\]](#)

1. Evropská unie ([Bahasa Ceko](#))
2. Unión Europea ([Bahasa Spanyol](#))
3. Europæiske Union ([Bahasa Denmark](#))
4. Europäische Union ([Bahasa Jerman](#))
5. Euroopa Liit ([Bahasa Esti](#))
6. An tAontas Eorpach ([Bahasa Irlandia](#))
7. Ευρωπαϊκή Ένωση ([Bahasa Yunani](#))
8. European Union ([Bahasa Inggris](#))
9. Union Européenne ([Bahasa Perancis](#))
10. Európai Unió ([Bahasa Hongaria](#))
11. Unione Europea ([Bahasa Italia](#))
12. Eiropas Savienība ([Bahasa Latvi](#))
13. Europos Sąjunga ([Bahasa Lituavi](#))
14. L-Unjoni Ewropea ([Bahasa Malta](#))
15. Europese Unie ([Bahasa Belanda](#))
16. Unia Europejska ([Bahasa Polski](#))
17. União Europeia ([Bahasa Portugis](#))
18. Euroopan unioni ([Bahasa Finlandia](#))
19. Evropska unija ([Bahasa Slovenia](#))
20. Európska únia ([Bahasa Slowakia](#))
21. Europeiska Unionen ([Bahasa Swedia](#))
22. Uniunea Europeană ([Bahasa Romania](#))
23. Европейски съюз ([Bahasa Bulgaria](#))

1961: Pembangunan Tembok Berlin

Pada tanggal 13 Agustus 1961, **RDJ** menutup wilayahnya dengan membangun tembok di tengah kota Berlin dan dengan "koridor maut" sepanjang perbatasan antara kedua negara Jerman. →

Tembok Berlin



Tembok Berlin pada tanggal [16 November 1989](#).



Topographie des Terrors.

Tembok Berlin adalah sebuah tembok perbatasan yang memisahkan [Berlin Barat](#) dan [Berlin Timur](#) serta daerah [Jerman Timur](#) lainnya sehingga membuat Berlin Barat sebuah [enklave](#).

Pembangunan Tembok

Tembok ini didirikan pada tanggal [13 Agustus 1961](#) oleh pemerintahan komunis Jerman Timur di bawah pimpinan [Walter Ulbricht](#) karena Berlin Barat adalah sebuah 'lubang' di negara mereka. Antara tahun [1949](#) sampai tahun [1961](#) sudah lebih dari 2 juta penduduk Jerman Timur melarikan diri lewat Berlin. Hal ini membuat [ekonomi](#) Jerman Timur menjadi kedodoran, karena kebanyakan orang-orang yang masih muda yang melarikan diri. Maka secara rahasia dan tiba-tiba tembok ini dibangun.

Tembok Berlin dan Perang Dingin

Tembok Berlin yang mengurung Berlin Barat dan memotong kota ini persis di tengahnya, menjadi simbol [Perang Dingin](#) yang paling terkenal. Banyak pembesar barat, terutama presiden [Amerika Serikat](#) yang mengunjungi tembok ini untuk mengutuknya. Presiden [J.F Kennedy](#) pada tahun 1963 datang dan berpidato di sisi tembok ini dengan [kalimatnya](#) yang ternama: "[Ich bin ein Berliner](#)." Lalu 20 [tahun](#) kemudian, pada tahun [1983](#) presiden [Ronald Reagan](#) juga berpidato di sini dan mengutuk [Uni Soviet](#) yang disebutnya *An Evil Empire*, atau sebuah kerajaan kejahatan. Tetapi pada tahun [1989](#), pada hari peringatan [Republik Demokratis Jerman](#), atau Jerman Timur, pemimpin [Uni Soviet](#), [Mikhail Gorbachev](#) juga sempat mengunjungi Tembok Berlin dan berkata pada pemimpin Jerman Timur [Erich Honecker](#) bahwa "Barangsiapa terlambat datang, akan dihukum oleh hidup".



Tentara penjaga perbatasan Jerman Timur, [Conrad Schumann](#), melompati kawat berduri pada tanggal [15 Agustus 1961](#).

Pelarian melalui Tembok Berlin

Mula-mula tembok ini hanya berupa kawat-kawat berduri saja, tetapi lama-lama dibangun tembok batu yang dilengkapi dengan menara-menara pengawas dan senjata-senjata otomatis bersensor. Meskipun begitu, hal ini tidak mencegah ratusan orang dari Jerman Timur melarikan diri ke Dunia Barat melewati tembok ini sampai dibukanya Tembok Berlin pada tanggal [9 November 1989](#).

Catatan dari teks asli:

Berliner Mauer



Die Berliner Mauer am Bethaniendamm, 1986



Verlauf der [West-Berliner](#) (gelb) und [Ost-Berliner](#) (grau) Stadtgrenzen und Grenzübergangsstellen (Stand: 1989)



Die Berliner Mauer aus „Augenhöhe“, 1985



Reste der Berliner Mauer, 2004

Die **Berliner Mauer** war während der [Teilung Deutschlands](#) mehr als 28 Jahre lang ein Grenzbefestigungssystem entlang der Grenze zwischen den [Westsektoren Berlins](#) einerseits und dem [Ostteil der Stadt](#) sowie der umgebenden [Deutschen Demokratischen Republik](#) (DDR) andererseits. Sie war Teil einer 1378 Kilometer langen [innerdeutschen Grenze](#) zwischen der DDR und der [Bundesrepublik Deutschland](#). In der DDR wurde sie als „befestigte Staatsgrenze“ oder ([propagandistisch](#)) als „[antifaschistischer](#) Schutzwall“ bezeichnet (von [Horst Sindermann](#) geprägt).^{[1][2][3]} Hauptzweck war die Verhinderung der [Flucht aus der DDR](#) durch deren Einwohner, die dort als „[ungesetzlicher Grenzübertritt](#)“ (Republikflucht) unter Strafe stand. Die Berliner Mauer war Bestandteil und zugleich markantes Symbol des Konflikts im [Kalten Krieg](#) zwischen den [Westmächten](#) unter Führung der [USA](#) und dem [Ostblock](#) unter Führung der [Sowjetunion](#). Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 trennte sie innerhalb der durch die Nachkriegsordnung der [Alliierten Siegermächte](#) entstandenen [Viersektorenstadt](#) das Stadtgebiet von [Groß-Berlin](#) in zwei Teile: [Berlin \(West\)](#) und [Ost-Berlin](#) („Hauptstadt der DDR“). Da die Mauer auch in dem ganzen Berlin (West) umgebenden Gebiet der DDR errichtet wurde, war der Westteil der Stadt fortan eine von Mauern umgebene westliche Insel, auch „Schaufenster der freien Welt“ genannt.

Für die [DDR-Grenzsoldaten](#) galt in Fällen des „ungesetzlichen Grenzübertretts“ der [Schießbefehl](#). Bei den Versuchen, die 167,8 Kilometer langen^[4] und schwer bewachten Grenzanlagen in Richtung West-Berlin zu überwinden, wurden nach derzeitigem Forschungsstand zwischen 136 und 206 Menschen getötet. Die genaue Zahl der [Todesopfer an der Berliner Mauer](#) ist nicht bekannt.

Geschichte

Vorgeschichte

Nach dem Ende des [Zweiten Weltkrieges](#) 1945 wurde [Deutschland](#) auf Beschluss der [Jaltakonferenz](#) in vier [Besatzungszonen](#) aufgeteilt, die von den alliierten Staaten [USA](#), [Sowjetunion](#), [Großbritannien](#) und [Frankreich](#) kontrolliert und verwaltet wurden. Analog wurde Berlin als ehemalige [Reichshauptstadt](#) in vier Sektoren geteilt. Wenig später begann auf verschiedensten Ebenen der [Kalte Krieg](#) zwischen West und Ost. Berlin wurde zu einem zentralen Gebiet von gegenseitigen Bspitzelungen der [Nachrichtendienste](#) aus Ost und West. 1948 kam es im Kalten Krieg mit der [Berlin-Blockade](#) der Sowjetunion zu einer ersten großen Krise. Am 23. Mai 1949 wurde in den drei Westzonen die [Bundesrepublik Deutschland](#) und am 7. Oktober des gleichen Jahres in der [Sowjetischen Besatzungszone](#) (SBZ) die DDR gegründet. Formal hatte Berlin den Status einer bezüglich deutschen Militärs [entmilitarisierten](#) Viersektorenstadt und war unabhängig von den beiden deutschen Staaten, was jedoch in der Praxis wenig Bedeutung hatte. West-Berlin näherte sich in vielem dem Status eines [Bundeslandes](#) an und wurde von bundesdeutscher Seite auch als solches betrachtet,^[5] allerdings wurde später im Rahmen der Entspannungspolitik und der Ostverträge darauf verzichtet, in West-Berlin Sitzungen des [Deutschen Bundestages](#), des [Bundesrats](#) und der [Bundesversammlung](#) stattfinden zu lassen. Bei der Gründung der DDR wurde ganz Berlin zu deren Hauptstadt erklärt, die [propagandistische](#) Bezeichnung *Hauptstadt der DDR* für den Ostteil der Stadt wurde allerdings erst in den 1960er-Jahren eingeführt.

Im Sommer 1945 wurden Demarkationslinien zwischen den Besatzungszonen, die sogenannte „Zonengrenzen“ gezogen. Teilweise wurden Schlagbäume und weiß-gelbe Holzpfeiler errichtet sowie Farbmarkierungen an Bäumen vorgenommen. Es war nun eine Genehmigung erforderlich, um die Zonengrenze zu überschreiten, nur für Pendler und Bauern wurde ein *kleiner Grenzverkehr* eingeführt. Auf Befehl der [Sowjetischen Militäradministration in Deutschland](#) (SMAD) wurde in der SBZ eine Grenzpolizei aufgebaut, die am 1. Dezember 1946 erstmals aktiv wurde, Bestimmungen für den Gebrauch der Schusswaffe wurden erlassen. Für Reisen zwischen der SBZ und den Westzonen mussten nun [Interzonenpässe](#) beantragt werden. Erste Grenzanlagen wurden auf der Ostseite errichtet, insbesondere in Waldgebieten Stacheldraht-Hindernisse, an grenzüberschreitenden Straßen und Wegen Straßensperren.

Seit der Errichtung der DDR flüchteten Bürger in die [Bundesrepublik](#), wobei auch außergewöhnliche und oft lebensgefährliche Fluchtmöglichkeiten ergriffen wurden. Seit 1952 wurde die [innerdeutsche Grenze](#) durch die DDR mittels Zäunen, Bewachung und Alarmvorrichtungen gesichert.

Es wurde eine fünf Kilometer breite Sperrzone eingerichtet, die nur mit einer Sondergenehmigung – typischerweise für Anwohner – betreten werden durfte. In Richtung der Grenze gab es wiederum einen 500 Meter breiten Schutzstreifen, an den sich unmittelbar an der Grenze ein zehn Meter breiter Kontrollstreifen anschloss.

Seit 1952 gab es auch Überlegungen der [SED](#)-Führung, die Grenze zu West-Berlin abzuriegeln, zum einen fehlte damals aber eine Zustimmung der Sowjetunion, zum anderen wäre eine Abriegelung aus verkehrstechnischen Gründen kaum möglich gewesen: Vor der Fertigstellung des [Berliner Außenringes](#), eines Eisenbahnringes um West-Berlin herum, war die DDR-Reichsbahn auf Fahrten durch West-Berlin angewiesen.^[6] Gleichwohl wurden auf vielen nach West-Berlin führenden Straßen und Eisenbahnen Personenkontrollen durchgeführt, um u. a. Fluchtverdächtige aufzugreifen.

Die 45,1 Kilometer^[7] lange Sektorengrenze als Stadtgrenze zwischen West-Berlin und Ost-Berlin, die kaum zu kontrollieren war und wie ein Schlupfloch wirkte, blieb daher zunächst offen.



Grenzkontrolle am Brandenburger Tor, August 1961

Zwischen 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer flohen etwa 3,5 Millionen Menschen aus der [sowjetischen Besatzungszone](#) und der späteren DDR bzw. Ost-Berlin.^[8] Außerdem war für viele [Polen](#) und [Tschechen](#) West-Berlin ein Tor in den Westen. Da es sich dabei oft um gut ausgebildete junge Menschen handelte, bedrohte diese Abwanderung die [Wirtschaftskraft](#) der DDR und letztlich den Bestand des Staates. Etwa 50.000 Ost-Berliner arbeiteten zudem als sogenannte „[Grenzgänger](#)“ in West-Berlin, lebten und wohnten aber zu den finanziell günstigen Bedingungen in Ost-Berlin oder im Berliner Umland. Am 4. August 1961 wurden die Grenzgänger per Verordnung durch den Ost-Berliner Magistrat angewiesen, sich registrieren zu lassen und Mieten sowie Mietnebenkosten künftig in [D-Mark](#) zu zahlen. Schon vor dem Mauerbau kontrollierte die [Volkspolizei](#) im Ostteil Berlins die in den Westteil der Stadt führenden Straßen und Verkehrsmittel intensiv auf sogenannte verdächtige „Republikflüchtlinge“ und „Schmuggler“. Außerdem kauften viele West-Berliner und in West-Berlin arbeitende Ost-Berliner, mit der auf dem Devisenschwarzmarkt günstig getauschten [Mark der DDR](#) – Umtauschkurs ca. 1:4 – die vergleichsweise billigen Grundnahrungsmittel und die wenigen hochwertigen [Konsumgüter](#) in Ost-Berlin. Das [planwirtschaftliche](#) Wirtschaftssystem auf östlicher Seite wurde dadurch zusätzlich geschwächt. Die Mauer sollte den Machthabern des [Ostblocks](#) dazu dienen, die umgangssprachlich so bezeichnete „Abstimmung mit den Füßen“, weg aus dem „Sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat“, endgültig durch Abriegelung der Grenzen zu stoppen.

Mauerbau



Mauerbau, Aufstellen von Betonblöcken, 1961



Mauerbau, August 1961 (Bundesarchiv)

Der Plan zum Bau der Mauer in Berlin war ein Staatsgeheimnis der DDR-Regierung. Die Mauer wurde auf Geheiß der [SED-Führung](#) unter Schutz und Überwachung durch [Volkspolizisten](#) und Soldaten der [Nationalen Volksarmee](#) von Bauarbeitern errichtet – entgegen den Beteuerungen des [Staatsratsvorsitzenden](#) der DDR, [Walter Ulbricht](#), auf einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin am 15. Juni 1961. Die [Journalistin](#) Annamarie Doherr von der [Frankfurter Rundschau](#) hatte damals die Frage gestellt:

„Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doherr, [Frankfurter Rundschau](#). Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?“

Walter Ulbricht antwortete^[9]:

„Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in [Westdeutschland](#) gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Ääh, mir ist nicht bekannt, dass [eine] solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll ausgenutzt, ääh, eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“

Ulbricht war damit der erste, der den Begriff „Mauer“ in diesem Bezug öffentlich verwendete – zwei Monate, bevor sie überhaupt stand.

Zwar wurden die [Westalliierten](#) durch Gewährsleute über die Planung „drastischer Maßnahmen“ zur Abriegelung von West-Berlin informiert, vom konkreten Zeitpunkt und Ausmaß der Absperrung gaben sie sich jedoch öffentlich überrascht. Da ihre Zugangsrechte nach West-Berlin nicht beschnitten wurden, griffen sie nicht militärisch ein. Die Außenminister der drei Westmächte und der Bundesrepublik beschlossen am 7. August in [Paris](#), vorbereitende Maßnahmen zu treffen, um einer kritischen Situation in Berlin begegnen zu können.

Auch der [Bundesnachrichtendienst](#) (BND) hatte ähnliche Informationen bereits Mitte Juli erhalten. Nach Ulbrichts Besuch bei [Chruschtschow](#) während des hochrangigen Treffens der Staaten des [Warschauer Pakts](#) vom 3.–5. August 1961 in [Moskau](#) stand im BND-Wochenbericht vom 9. August:

„Vorliegende Meldungen zeigen, daß das Pankower Regime sich darum bemüht, die Einwilligung Moskaus für die Inkraftsetzung durchgreifend wirksamer Sperrmaßnahmen – wozu insbesondere eine Abriegelung der Berliner Sektorengrenze und die Unterbrechung des [S-](#) und [U-Bahn](#)-Verkehrs in Berlin gehören würde – zu erhalten. [...] Es bleibt abzuwarten, ob und wie weit Ulbricht [...] in Moskau [...] mit entsprechenden Forderungen durchzudringen vermochte.“

In der veröffentlichten Erklärung der Teilnehmerstaaten des Treffens des Warschauer Pakts wurde vorgeschlagen, „an der Westberliner Grenze der Wühltätigkeit gegen die Länder des sozialistischen Lagers den Weg zu verlegen und um das Gebiet Westberlins eine verlässliche Bewachung und wirksame Kontrolle zu gewährleisten.“ Am 7. August kündigte Ministerpräsident Chruschtschow in einer Rundfunkrede eine Verstärkung der sowjetischen Streitkräfte an den Westgrenzen und die Einberufung von Reservisten an. Am 11. August billigte die [Volkskammer](#) der DDR die Ergebnisse der Moskauer Beratung und bevollmächtigte den Ministerrat zu allen entsprechenden Maßnahmen. Der Ministerrat der DDR beschloss am 12. August den Einsatz der „[bewaffneten Organe](#)“ zur Besetzung der Grenze zu West-Berlin und zur Errichtung von Grenzsperrern.

Am Samstag, dem 12. August, ging beim BND aus Ost-Berlin folgende Information ein:

„Am 11. August 1961 hat eine Konferenz der Parteisekretäre der parteigebundenen Verlage und anderer Parteifunktionäre beim [Zentralkomitee der SED](#) (ZK) stattgefunden. Hier wurde u. a. erklärt: [...] Die Lage des ständig steigenden Flüchtlingsstroms mache es erforderlich, die Abriegelung des Ostsektors von Berlin und der SBZ in den nächsten Tagen – ein genauer Tag wurde nicht angegeben – durchzuführen und nicht, wie eigentlich geplant, erst in 14 Tagen.“



Ein Volkspolizist und ein Kampftruppenangehöriger sichern den Mauerbau (August 1961)
In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begannen die [NVA](#), 5000 Angehörige der Deutschen Grenzpolizei (Vorläufer der [Grenztruppen](#)), 5000 Angehörige der Schutz- und Kasernierten Volkspolizei und 4500 Angehörige der [Betriebskampfgruppen](#) die Straßen und Gleiswege nach West-Berlin abzuriegeln. Sowjetische Truppen hielten sich in Gefechtsbereitschaft und waren an den alliierten Grenzübergängen präsent. Alle noch bestehenden Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Teilen Berlins wurden unterbrochen. Dies betraf allerdings nur noch die [U-Bahn](#) und die [S-Bahn](#). Jedoch waren die West-Berliner S-Bahn- und U-Bahn-Linien auf den Tunnelstrecken unter Ost-Berliner Gebiet nur insoweit betroffen, dass die Stationen abgesperrt wurden und ein Ein- bzw. Ausstieg nicht mehr möglich war. Die Züge fuhren ab dem 13. August abends ohne planmäßigen Halt durch die zu sogenannten „[Geisterbahnhöfen](#)“ gewordenen Stationen. Nur die den Bahnhof Friedrichstraße berührenden Linien hatten einen Halt zum Erreichen der dort eingerichteten Grenzübergangsstelle. [Erich Honecker](#) war als damaliger ZK-Sekretär für Sicherheitsfragen für die gesamte Planung und Umsetzung des Mauerbaus politisch im Namen der SED-Führung verantwortlich.

Die Bezeichnung eines einzelnen Tages als „Bau der Mauer“ ist vollkommen unzutreffend, da an diesem Tag „nur“ die Sektorengrenze abgeriegelt wurde. Vielfach wurde zunächst nur ein Zaun errichtet bzw. Hauseingänge zugemauert. Auch in den Tagen nach dem Mauerbau kam es noch zu vielfachen Fluchtversuchen, zum Teil aus den Fenstern der unmittelbar auf der Grenze stehenden Häuser, wo Zug um Zug zunächst die Fenster der unteren Geschosse zugemauert wurden um später die Häuser ganz abzureißen. Die Abriegelung brachte auch obskure Situationen mit sich, vor allem im Bereich der Exklaven, wo es später teilweise auch zu Gebietsaustauschen kam. Interessanterweise wurde das [Lenné-Dreieck](#), obwohl zu Ost-Berlin gehörend, bei der Mauer ausgespart. Mangels Befugnis der West-Berliner Behörden entwickelte sich das Terrain zeitweise zu einem faktisch [rechtsfreien Raum](#).

Die sowjetische Regierung erklärte am 24. August, dass die [Luftkorridore](#) nach West-Berlin zur Einschleusung westdeutscher „Agenten, Revanchisten und Militaristen“ missbraucht würden. West-Berlin gehöre nicht zur Bundesrepublik; deshalb könne sich die Kompetenz von Amtsstellen der Bundesrepublik nicht auf Berlin erstrecken.

Bis zum September 1961 [desertierten](#) allein von den eingesetzten Sicherungskräften 85 Mann nach West-Berlin, außerdem gab es 216 gelungene [Fluchtversuche](#) von 400 Menschen. Unvergessen sind bekannte Bilder von an Bettlaken aus den angrenzenden Häusern herabgelassenen Flüchtlingen, einer alten Frau, die in ein Sprungtuch der West-Berliner Feuerwehr fällt und dem den Stacheldraht überspringenden jungen Grenzpolizisten [Conrad Schumann](#) in der [Bernauer Straße](#).

Westdeutsche Reaktionen

Bundeskanzler [Konrad Adenauer](#) rief noch am gleichen Tag über Radio die Bevölkerung zur Ruhe und Besonnenheit auf und verwies auf nicht näher benannte Reaktionen, die gemeinsam mit den Alliierten folgen würden. Erst zwei Wochen nach dem Mauerbau besuchte er West-Berlin. Allein der regierende Bürgermeister [Willy Brandt](#) protestierte energisch, aber letztlich machtlos, gegen die Einmauerung West-Berlins und die endgültig scheinende Teilung der Stadt. Die westdeutschen Bundesländer gründeten noch im gleichen Jahr die [Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen](#) in [Salzgitter](#), um Menschenrechtsverletzungen auf dem Gebiet

der DDR zu dokumentieren und so zumindest symbolisch dem Regime Einhalt zu gebieten. Am 16. August 1961 kam es zu einer Protestdemonstration von Willy Brandt und 300.000 West-Berlinern vor dem [Rathaus Schöneberg](#).

Alliierte Reaktionen



Luftbild vom [Brandenburger Tor](#), 1967



US-Soldaten und DDR-Volkspolizisten diskutieren die Verfahrensweise beim Grenzübertritt (Oktober 1961)



US-Präsident [Richard Nixon](#) 1969 an der Berliner Mauer

Die Reaktionen der westlichen Alliierten auf den Mauerbau kamen sukzessive: Nach 20 Stunden erschienen Militärstreifen an der Grenze. Nach 40 Stunden wurde eine Rechtsverwahrung an den sowjetischen Kommandanten Berlins geschickt. Nach 72 Stunden gingen diplomatische Proteste der Alliierten – um der Form Genüge zu tun – in Moskau ein. Es gab immer wieder Gerüchte, dass die Sowjets den westlichen Alliierten vorher versichert hätten, deren Rechte an West-Berlin nicht anzutasten. Tatsächlich war angesichts der Erfahrung der [Berlin-Blockade](#) der Status von West-Berlin in den Augen der Westalliierten stets gefährdet – der Mauerbau war nun eine gegenständliche Manifestierung des [Status quo](#).

„Keine sehr schöne Lösung, aber tausendmal besser als Krieg.“

– [JOHN F. KENNEDY](#), US-PRÄSIDENT

„Die Ostdeutschen halten den Flüchtlingsstrom auf und verschanzen sich hinter einem noch dichterem [Eisernen Vorhang](#). Daran ist an sich nichts Gesetzwidriges.“

– [HAROLD MACMILLAN](#), BRITISCHER PREMIERMINISTER

US-Präsident [John F. Kennedy](#) stand zur „freien Stadt“ Berlin. Er sandte eine zusätzliche Kampfgruppe mit 1500 Mann über die Transitstrecke nach West-Berlin und reaktivierte General [Lucius D. Clay](#). Am 19. August 1961 trafen Clay und US-Vizepräsident [Lyndon B. Johnson](#) in West-Berlin ein. Die Amerikaner wiesen Versuche der Volks- und Grenzpolizei energisch zurück, alliierte Offiziere und Angestellte kontrollieren zu wollen. Schließlich wirkte [Marschall](#)

[Iwan Konew](#), der Oberkommandierende der [Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland](#) (GSSD), mäßigend auf die DDR-Funktionäre ein.

Zu einer direkten Konfrontation zwischen amerikanischen und sowjetischen Truppen kam es am 27. Oktober 1961 am [Checkpoint Charlie](#) auf der [Friedrichstraße](#), als sich – als finale Folge von Unstimmigkeiten – jeweils zehn Kampfpanzer der amerikanischen und sowjetischen Armee unmittelbar am Grenzstrich gegenüber aufbauten. Am nächsten Tag wurden jedoch beide Panzergruppen wieder zurückgezogen. Dieses kalte [Scharmützel](#) beinhaltete aber enorme politische Bedeutung, da es den Amerikanern auf diese Weise gelungen war zu belegen, dass die Sowjetunion und nicht die DDR für den Ostteil Berlins verantwortlich war. Beide Seiten wollten den Kalten Krieg wegen Berlin nicht eskalieren oder einen [Atomkrieg](#) riskieren.



US-Präsident [John F. Kennedy](#) und Bundeskanzler [Konrad Adenauer](#) am 26. Juni 1963 am [Checkpoint Charlie](#)

Der US-amerikanische Außenminister [Dean Rusk](#) sprach sich in einem Fernsehinterview am 28. Februar 1962 für die Schaffung einer internationalen Behörde zur Überwachung des freien Zugangs nach Berlin und gegen eine Anerkennung der DDR aus, und am 24. April erklärte Rusk, die US-Regierung halte den freien Zugang nach Berlin und Befugnisse der DDR-Behörden an den Zugangswegen für unvereinbar. Der BRD-Außenminister [Heinrich von Brentano](#) und der französische Staatspräsident [Charles de Gaulle](#) wiederum sprachen sich in Pressekonferenzen gegen eine internationale Zugangskontrollbehörde für Berlin aus.

Im Juni 1963 besuchte [US-Präsident](#) Kennedy Berlin. Vor dem [Rathaus Schöneberg](#) hielt er eine Rede über die Mauer, in der er die historischen Worte „[Ich bin ein Berliner](#)“ sprach. Dieser symbolische Akt bedeutete den West-Berlinern insbesondere in Anbetracht der amerikanischen Akzeptanz beim Bau der Mauer viel. Für die Westalliierten und die DDR bedeutete der Mauerbau eine politische und militärische Stabilisierung, der Status quo von West-Berlin wurde zementiert – die Sowjetunion gab ihre im [Chruschtschow-Ultimatum](#) noch 1958 formulierte Forderung nach einer entmilitarisierten, „freien“ Stadt West-Berlin auf.

Am 22. August 1962 wurde die sowjetische Kommandantur in Berlin aufgelöst. Am 28. September 1962 erklärte der US-amerikanische Verteidigungsminister McNamara in Washington, dass der freie Zugang nach Berlin mit allen Mitteln gesichert werde. Die Außenminister der drei Westmächte und der Bundesrepublik kamen am 12. Dezember 1962 in Paris überein, dass der Sowjetunion keine neuen Vorschläge zur [Berlin-Frage](#) gemacht werden sollten.

Anlässlich eines Arbeitsbesuches von Bundeskanzler [Ludwig Erhard](#) am 11. Juni 1964 in [Paris](#) bot der französische Präsident [Charles de Gaulle](#) für den Fall eines militärischen Konflikts um Berlin oder die Bundesrepublik den sofortigen Einsatz französischer Atomwaffen an.

Die Regierungen der drei Westmächte bekräftigten in einer gemeinsamen Erklärung am 26. Juni 1964 zum Freundschaftsvertrag zwischen der Sowjetunion und der DDR vom 12. Juni 1964 ihre Mitverantwortung für ganz Berlin.

Geteiltes Land



Geteilte Straße (Harzer/Bouchéstraße, 1989)

West-Berliner durften bereits seit dem 1. Juni 1952 nicht mehr frei in die DDR einreisen. Nach langen Verhandlungen wurde 1963 das [Passierscheinabkommen](#) getroffen, das mehreren hunderttausend West-Berlinern zum Jahresende den Besuch ihrer Verwandtschaft im Ostteil der Stadt ermöglichte.

Die DDR verbot ab dem 13. April 1968 Ministern und Beamten der Bundesrepublik den Transit nach West-Berlin durch ihr Gebiet. Am 19. April 1968 protestieren die drei Westmächte gegen diese Anordnung. Am 12. Juni 1968 führte die DDR die Pass- und Visapflicht für den Transitverkehr zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik Deutschland ein. Als Reaktion auf die von der DDR eingeführten Visagebühren im Berlin-Verkehr beschloss der [NATO-Rat](#), künftig bei Reisegenehmigungen für DDR-Funktionäre in [NATO](#)-Staaten eine Gebühr zu erheben. Am 8. Februar 1969 erließ die DDR-Regierung mit Wirkung ab dem 15. Februar ein Durchreiseverbot für die Mitglieder der nach West-Berlin einberufenen [Bundesversammlung](#) sowie für Bundeswehrangehörige und Mitglieder des Verteidigungsausschusses des [Deutschen Bundestages](#). Die sowjetische Regierung protestierte gegen die Wahl des Bundespräsidenten in West-Berlin. Am 5. März 1969 wurde [Gustav Heinemann](#) in West-Berlin zum [Bundespräsidenten](#) gewählt.



[Streckmetallgitterzaun](#) im Grenzbereich Berlin

Die drei Westmächte schlugen der Sowjetunion am 15. Dezember 1969 Vier-Mächte-Gespräche über eine Verbesserung der Situation in Berlin und auf den Zugangswegen nach Berlin vor. 1971 sicherte das [Viermächteabkommen über Berlin](#) die Erreichbarkeit West-Berlins und beendete die wirtschaftliche Bedrohung durch Schließung der Zufahrtsrouten. Ferner bekräftigten alle vier Mächte die gemeinsame Verantwortung für ganz Berlin und stellten klar, dass West-Berlin kein Bestandteil der Bundesrepublik sei und nicht von ihr regiert werden dürfe. Während die Sowjetunion den Vier-Mächte-Status jedoch nur auf West-Berlin bezog, unterstrichen die Westalliierten 1975 in einer Note an die [Vereinten Nationen](#) ihre Auffassung vom Viermächtestatus über Gesamt-Berlin.

Ab Anfang der 1970er-Jahre wurde mit der durch [Willy Brandt](#) und [Erich Honecker](#) eingeleiteten Politik der Annäherung zwischen der DDR und der [Bundesrepublik Deutschland](#) (→ [Neue Ostpolitik](#)) die Grenze zwischen den beiden Staaten etwas durchlässiger. Die DDR gewährte nun Reiseerleichterungen, insbesondere für „unproduktive“ Bevölkerungsgruppen wie Rentner, und vereinfachte für Bundesbürger aus grenznahen Regionen Besuche in der DDR. Eine umfassendere [Reisefreiheit](#) machte die DDR von der Anerkennung ihres Status als souveräner [Staat](#) abhängig und verlangte die [Auslieferung](#) von nicht rückkehrwilligen DDR-Reisenden. Die Bundesrepublik Deutschland erfüllte aufgrund des [Grundgesetzes](#) diese Forderungen nicht.



Sektorengrenze in [Berlin-Heiligensee](#) (1982)

Die DDR-[Propaganda](#) bezeichnete die Mauer, wie auch die gesamte Grenzsicherung zur Bundesrepublik, als [antifaschistischen](#) *Schutzwall*, der die DDR vor „Abwanderung, Unterwanderung, Spionage, Sabotage, Schmuggel, Ausverkauf und Aggression aus dem Westen“ schützen sollte. Zur Propagierung dieser Darstellung gehörte die Veranstaltung von [Schauprozessen](#), wovon der gegen [Gottfried Strympe](#) 1962 mit einem [Justizmord](#) endete. Die Sperranlagen richteten sich hauptsächlich gegen die eigenen Bürger. Dieser Umstand durfte in der Öffentlichkeit der DDR ebenso wenig thematisiert werden wie die Tatsache der massenhaften Republikfluchten. Zwischen dem 13. August 1961 und dem 9. November 1989 gab es 5.075 gelungene Fluchten nach [West-Berlin](#) oder [Westdeutschland](#), davon 574 [Fahnenfluchten](#)^[10].

Mauerfall

Die Berliner Mauer „fiel“ in der Nacht von Donnerstag, dem 9. November, auf Freitag, den 10. November 1989, nach über 28 Jahren ihrer Existenz. Die Vorbereitung einer von Seiten der DDR-Regierung kontrollierten Öffnung der Mauer reichten zurück bis in den Oktober 1989: [Walter Momper](#), damals [Regierender Bürgermeister von Berlin](#), wusste nach eigenen Angaben seit dem 29. Oktober davon aus einem Gespräch mit Ost-Berlins SED-Chef [Günter Schabowski](#) und Ost-Berlins Oberbürgermeister [Erhard Krack](#) und traf seinerseits entsprechende Vorbereitungen für eine Öffnung der Mauer im Dezember 1989.^[11] Am Vormittag des 9. November erhielt sein Staatssekretär Jörg Rommerskirchen von einem Journalisten der [Bild-Zeitung](#), Peter Brinkmann, einen vertraulichen Hinweis, dass es noch an diesem Tag zu einer Öffnung der Mauer kommen werde, worauf man in West-Berlin im Eiltempo entsprechende Vorbereitungen traf.

Zur Öffnung der Mauer führten zum einen Massenkundgebungen in der [Wendezeit](#) und die Forderung nach [Reisefreiheit](#) in der damaligen DDR sowie die anhaltende sogenannte „[Republikflucht](#)“ großer Bevölkerungsteile der DDR in die Bundesrepublik Deutschland über das Ausland, teils über Botschaften in verschiedenen [osteuropäischen](#) Hauptstädten (unter anderem [Prag](#) und [Warschau](#)), teils über die in [Ungarn](#) seit dem 11. September 1989 offene Grenze zu [Österreich](#) und seit Anfang November direkt über die [Tschechoslowakei](#).

Nachdem der am 6. November 1989 veröffentlichte Entwurf eines neuen Reisegesetzes auf scharfe Kritik gestoßen war und die tschechoslowakische Führung auf diplomatischem Wege zunehmend schärfer gegen die Ausreise von DDR-Bürgern über ihr Land protestierte, beschloss das [Politbüro des Zentralkomitees der SED](#) am 7. November, eine Regelung für die [ständige Ausreise](#) vorzuziehen.

Am Morgen des 9. November erhielt Oberst [Gerhard Lauter](#), Hauptabteilungsleiter für Pass- und Meldewesen im Innenministerium, die Aufgabe, ein neues Reisegesetz zu erarbeiten. Der entsprechende Entwurf, der zusätzlich einen Passus zu Besuchsreisen enthielt, wurde am 9. November vom Politbüro bestätigt und in Richtung [Ministerrat](#) weitergeleitet. Im weiteren Geschäftsgang wurde zu dem Beschlussentwurf eine Vorlage an den Ministerrat erstellt, die zwar noch am selben Tag bis 18 Uhr im [Umlaufverfahren](#) gebilligt, aber erst am 10. November um 4 Uhr morgens als Übergangsregelung über die staatliche Nachrichtenagentur [ADN](#) veröffentlicht werden sollte.



Pressekonferenz mit [Günter Schabowski](#) am 9. November 1989

Allerdings legte das Justizministerium am 9. November Einspruch ein. Parallel zum Umlaufverfahren wurde die Ministerratsvorlage am Nachmittag des 9. November im Zentralkomitee behandelt und leicht abgeändert. Die handschriftlich entsprechend abgeänderte Ministerratsvorlage übergab [Egon Krenz](#) an das SED-Politbüro-Mitglied [Günter Schabowski](#), bevor dieser zu der angesetzten Pressekonferenz über die Ergebnisse der ZK-Tagung ging, ohne ihn explizit über die beschlossene Sperrfrist bis 4 Uhr morgens zu informieren.^{[12][12]} Schabowski war bei den vorangegangenen Beratungen in Politbüro und ZK nicht anwesend gewesen.

Diese Pressekonferenz mit Günter Schabowski im Presseamt/Internationalen Pressezentrum in der Ost-Berliner Mohrenstraße 38 (jetzt Teil des [Bundesjustizministeriums](#)), die über das Fernsehen und im Radio live übertragen wurde und daher von vielen Bürgern zeitgleich mitverfolgt werden konnte, wurde zum Auslöser für die Maueröffnung. Am Ende der Pressekonferenz um 18:53 Uhr stellte der Korrespondent der [italienischen](#) Agentur [ANSA](#), [Riccardo Ehrman](#), eine Frage zum Reisegesetz. Im April 2009 gab Ehrman an, zuvor einen Anruf erhalten zu haben, in dem ihn ein Mitglied des Zentralkomitees bat, eine Frage zum Reisegesetz zu stellen.^[13] Die Frage lautete gemäß Protokoll der Pressekonferenz (grammatikalisch nicht ganz korrekt).^[14]

„Sie haben von Fehlern gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen?“

Auf diese Frage antwortete Schabowski sehr umständlich und ausschweifend. Schließlich fiel ihm ein, dass er die neuen Reiseregeln auf der Pressekonferenz auch noch vorstellen sollte^[12] und sagte:

„Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.“

Auf die Zwischenfrage eines Journalisten „Ab wann tritt das in Kraft? Ab Sofort?“ antwortete Schabowski dann um 18:57 Uhr mit dem Verlesen des ihm von Krenz zuvor übergebenen Papiers.^[12]

„Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen (Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse) beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der VPKÄ – der Volkspolizeikreisämter – in der DDR sind angewiesen, [Visa](#) zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen [...]“

Auf die erneute Zwischenfrage des Hamburger Bild-Zeitungsreporters [Peter Brinkmann](#)^[15]: „Wann tritt das in Kraft?“ antwortete Schabowski wörtlich:

„Das tritt nach meiner Kenntnis [...] ist das sofort, unverzüglich.“

Nach zweimaliger Zwischenfrage eines Journalisten „Gilt das auch für Berlin-West?“ fand Schabowski schließlich den entsprechenden Passus der Vorlage:

„Die ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen.“

Aufgrund der von westdeutschen und West-Berliner Rundfunk- und Fernsehsendern sogleich verbreiteten Version, die Mauer sei „offen“, zogen mehrere Tausend Ost-Berliner zu den Grenzübergängen und verlangten die sofortige Öffnung. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die

Grenztruppen noch die für die eigentliche Abfertigung zuständigen Passkontrolleinheiten (PKE) des Ministeriums für Staatssicherheit oder die sowjetische Armee in Berlin darüber informiert, was die Gefahr eines eventuell bewaffneten Eingreifens bedeutete.^[16]

 <p>Schüler aus dem West-Berliner Ortsteil <u>Wedding</u> bildeten auf der <u>Bösebrücke</u> an der <u>Bornholmer Straße</u> Spalier und bereiteten den Besuchern aus der DDR einen ersten Empfang, 10. November 1989</p>	 <p>Die <u>Bösebrücke</u> mit zahlreichen DDR-Bürgern vor dem Grenzübergang am 18. November 1989</p>	 <p>West-Berliner an der schon deutlich beschädigten Mauer nahe dem <u>Reichstagsgebäude</u> Ende 1989</p>	 <p>Stempel „Bornholmer Straße“ im <u>Reisepass</u> (Januar 1990)</p>
 <p>Mauer und Brandenburger Tor am 1. Dezember 1989</p>	 <p>Demonstranten auf der Berliner Mauer im Dezember 1989, im Hintergrund das Brandenburger Tor</p>	 <p>„<u>Mauerspechte</u>“ schaffen bis Ende Dezember 1989 Durchbrüche</p>	 <p>Teile der Berliner Mauer mit Graffiti in einem Glas</p>

Um den großen Druck der Menschenmassen zu mindern, wurde am Grenzübergang Bornholmer Straße um 21:20 Uhr den ersten Ostdeutschen dort erlaubt, nach West-Berlin auszureisen. Dabei wurden die Ausreisenden kontrolliert und Personalausweise mancher als ungültig gestempelt, die DDR-Bürger als Inhaber dieser Ausweise damit ausgebürgert.^[17]

Um 21.15 Uhr passierten als erste die DDR-Bürgerinnen Annemarie Reffert und ihre 16-jährigen Tochter mit ihrem Pkw und ihren Personalausweisen den Grenzübergang Helmstedt-Marienborn. Da die Grenzsoldaten nicht informiert waren, wurden sie unter mehrmaligem Hinweis auf Schabowskis Verkündung von einer Kontrollstelle zur nächsten weitergereicht und konnten passieren.^{[18][19]} Der Deutschlandfunk berichtete davon unmittelbar danach in einer Kurzmeldung.

Um 21:30 Uhr brachte auch der Radiosender RIAS erste Reportagen von offenen Grenzübergängen. Es sammelten sich nach und nach dichte Menschenmassen an allen Übergängen, teilweise wurde die Lage bedrohlich. Am Grenzübergang Bornholmer Straße befürchtete der Diensthabende Leiter zudem, dass Ausreisewillige auch an die Waffen seiner Mitarbeiter kommen, die diese bei sich trugen. Deshalb befahl Oberstleutnant Harald Jäger schließlich gegen 23:30 Uhr eigenmächtig, die Grenzübergangsstelle zu öffnen und die Passkontrollen einzustellen. Unter dem Druck der Massen und aufgrund der fehlenden Unterstützung durch seine Vorgesetzten, sah Jäger nur diesen Ausweg. Jäger sagte dazu in der ARD-Dokumentation Schabowskis Zettel vom 2. November 2009 darüber:

„Das alles zusammengenommen, war dann das Motiv des Handelns, sodass ich gesagt habe, jetzt reicht mir’s. Jetzt entscheidst Du’s auf eigene Faust [...] Hab angewiesen, alle ausreisen zu lassen [...] lass alle ausreisen [...]“

Über diesen Grenzübergang gelangten zwischen 23:30 Uhr und 0:15 Uhr schätzungsweise 20.000 Menschen nach West-Berlin.^{[20][21]}

Anders als von den meisten Historikern dargestellt, behauptet ein 2009 im ZDF gesendeter Dokumentarfilm, der Grenzübergang Waltersdorfer Chaussee sei der erste offene Grenzübergang gewesen. Der Kommandant, Oberstleutnant Heinz Schäfer, sei direkt nach

Schabowskis Pressekonferenz zu „seinem“ Grenzübergang gefahren, habe die Sicherungsanlagen abschalten lassen und seinen Grenzsoldaten befohlen, Ausreisewillige auch wirklich durchzulassen. Auch habe er sofort seinen Soldaten alle scharfe Munition abgenommen. Gegen 20:30 Uhr habe er den zwischen Rudow und Schönefeld gelegenen Kontrollpunkt geöffnet. Die DDR-Bürger *Andreas Groß* und *Ralf Schmidt* berichten, dass sie am 9. November gegen 20:30 Uhr mit ihren Fahrrädern zum nahe gelegenen Grenzübergang an der Waltersdorfer Chaussee gefahren seien. Mit einem Ausreise-Stempel im Pass durften beiden nach West-Berlin ausreisen, mussten aber kurioserweise ihre Fahrräder an der Grenze zurücklassen. Auf Westseite wollen mehrere Augenzeugen ebenfalls ab 20:30 Uhr den zunehmenden Grenzverkehr nach West-Berlin beobachtet haben. In umgekehrter Richtung, als Heimkehrer von einem genehmigten Tagesaufenthalt in West-Berlin zurück kommend, berichtet der DDR-Bürger Patrick Koglin, dass er von den unbewaffneten Grenzsoldaten durchgewinkt worden sei. Auf die Bitte um eine Zählkarte für die nächste Ausreise sei ihm beschieden worden, eine solche würde er nicht mehr brauchen.^[16] Diese Darstellung wird jedoch von anderen Historikern mit Hinweis auf Mängel an der wissenschaftlichen Herangehensweise und der Darstellung widersprechender Stasiunterlagen angezweifelt.^[22]



„Mauerspecht“

Bis Mitternacht waren alle Grenzübergänge im Berliner Stadtgebiet offen. Auch die Grenzübergänge an der West-Berliner Außengrenze sowie an der innerdeutschen Grenze wurden in dieser Nacht geöffnet. Bereits am späten Abend verfolgten viele die Öffnung der Grenzübergänge im Fernsehen und machten sich teilweise dann noch auf den Weg. Der große Ansturm setzte am Vormittag des 10. November 1989 ein, da die Grenzöffnung um Mitternacht vielfach „verschlafen“ wurde.

Die DDR-Bürger wurden von der Bevölkerung West-Berlins begeistert empfangen. Die meisten Kneipen in der Nähe der Mauer gaben spontan Freibier aus und auf dem Kurfürstendamm gab es einen großen Volksauflauf mit hupendem Autokorso und wildfremden Menschen, die sich in den Armen lagen. In der Euphorie dieser Nacht wurde die Mauer auch von vielen West-Berlinern erklommen. Noch in der Nacht ordnete der Regierende Bürgermeister Walter Momper als Sofortmaßnahme die Schaffung zusätzlicher Aufnahmemöglichkeiten für Übersiedler sowie die Auszahlung des Begrüßungsgeldes über 100 DM auch durch die Sparkasse West-Berlins an.^[23] Einige Zeit nach Bekanntwerden der Nachricht von Schabowskis Pressekonferenz unterbrach der Bundestag in Bonn am Abend seine laufende Sitzung. Nach einer Pause gab Kanzleramtsminister Rudolf Seiters eine Erklärung der Bundesregierung ab, Vertreter aller Fraktionen begrüßten in ihren Beiträgen die Ereignisse. Im Anschluss erhoben sich die anwesenden Abgeordneten spontan von ihren Sitzen und sangen die Nationalhymne.^{[24][25]}

Entwicklung nach dem Mauerfall



Wachturm Typ BT-11 im ehemaligen Todesstreifen (vom Originalstandort leicht versetzt)
Die Mauer wurde nach dem 9. November 1989 zunächst weiter in unveränderter Intensität bewacht, unkontrollierte Grenzübertritte durch den Mauerstreifen wurden zunächst meist verhindert. In den ersten Wochen versuchten die Grenztruppen, die von den [Mauerspechten](#) geschlagenen Löcher zu reparieren.

Bereits für das Wochenende nach dem 9. November kündigte die DDR überraschend die Öffnung von zehn [neuen Grenzübergängen](#) an; darunter einige an besonders symbolträchtigen Orten, wie dem [Potsdamer Platz](#), der [Glienicker Brücke](#) und der [Bernauer Straße](#), am 22. Dezember 1989 folgte auch die Öffnung am [Brandenburger Tor](#) (in Gegenwart des Bundeskanzlers und des Ministerpräsidenten der DDR). An diesen Übergängen versammelten sich Menschenmengen, die auf die Öffnung warteten und jedes herausgehobene [Betonelement](#) bejubelten. Fotos und TV-Aufnahmen dieser Ereignisse werden in den Medien manchmal fälschlich als „Abriss der Mauer“ beschrieben, obwohl es sich nur um die Einrichtung neuer Grenzübergänge handelte.

Bundesbürger und West-Berliner durften erstmals am 24. Dezember 1989 ab 0:00 Uhr visafrei in die DDR einreisen; bis zu diesem Zeitpunkt galten noch die alten Regelungen bezüglich Visumpflicht und Mindestumtausch. In den Wochen zwischen dem 9. November und dem 23. Dezember hatten die DDR-Bürger daher in gewisser Weise „größere Reisefreiheit“ als die Westdeutschen.

Die Bewachung der Mauer wurde jedoch mit der Zeit immer lockerer; das unkontrollierte Überschreiten der Grenze durch die immer größer werdenden Löcher wurde zunehmend toleriert. Parallel dazu änderte sich die Praxis an den Übergängen hin zu nur noch stichprobenhafter Kontrolle des Verkehrsstroms. Der Prozess verstärkte sich besonders nach der [Wahl zur Volkskammer](#) am 18. März 1990. Bis zum 30. Juni 1990 wurden weitere neue Grenzübergänge nach West-Berlin geöffnet.

Am 1. Juli 1990, dem Tag des Inkrafttretens der [Währungsunion](#), wurden die Bewachung der Mauer und sämtliche Grenzkontrollen eingestellt. Bereits am 13. Juni 1990 hatte in der [Bernauer Straße](#) der offizielle Abriss begonnen. Inoffiziell begann der Mauerabbriss an der Bornholmer Straße wegen Bauarbeiten an der Eisenbahn. Daran beteiligt waren insgesamt 300 DDR-Grenzsoldaten sowie – nach dem 3. Oktober 1990 – 600 Pioniere der Bundeswehr. Diese waren mit 175 Lastwagen, 65 Kränen, 55 Baggern und 13 Planieraupen ausgerüstet. Der Abriss der innerstädtischen Mauer endete offiziell am 30. November 1990. Übrig blieben sechs Abschnitte, die als Mahnmal erhalten werden sollten. Der Rest der Mauer, insbesondere an der Berlin-Brandenburgischen Landesgrenze, verschwand bis November 1991. Bemalte Mauersegmente mit künstlerisch wertvollen Motiven wurden in Auktionen 1990 in Berlin und Monte Carlo versteigert.^[26]

Einige der Mauersegmente finden sich heute an verschiedenen Orten der Welt. So sicherte sich der US-Geheimdienst [CIA](#) für seinen Neubau in [Langley \(Virginia\)](#) einige künstlerisch verzierte Mauersegmente. In den [Vatikanischen Gärten](#) wurden im August 1994 einige Mauersegmente mit der aufgemalten [Sankt-Michaels-Kirche](#) aufgestellt.^{[27][28]} Ein weiteres Teilstück der Mauer kann im [Haus der Geschichte](#) in [Bonn](#) besichtigt werden. Ein Segment steht in der

Königinstraße am [Englischen Garten](#) in [München](#), eines am Stabsgebäude der [Panzerbrigade 21](#) „[Lipperland](#)“ in [Augustdorf](#), ein anderes in einem Neubaugebiet in [Weiden in der Oberpfalz](#). Weitere stellt das Friedensmuseum im französischen Ort [Caen](#) in der [Normandie](#) und das [Imperial War Museum](#) in [London](#) aus.^[29]

Struktur der Berliner Grenzanlagen

Die Berliner Mauer wurde ergänzt durch ausgedehnte Befestigungen der Grenze zur Bundesrepublik und – in geringerem Umfang – anderer Westgrenzen der Staaten des Warschauer Paktes, wodurch der sogenannte „[Eiserne Vorhang](#)“ materielle Gestalt annahm.

Wie die restliche [innerdeutsche Grenze](#) wurde auch die Berliner Mauer über weite Strecken mit umfangreichen Systemen von Stacheldrahthindernissen, Gräben, Panzerhindernissen, Kontrollwegen und Postentürmen versehen. Allein etwa 1000 Diensthunde waren in Hundelaufanlagen bis Anfang der 1980er-Jahre eingesetzt. Dieses System wurde über Jahrzehnte ständig ausgebaut. Dazu gehörte, dass nahe an der Mauer stehende Häuser, deren Bewohner zwangsweise umgesiedelt wurden, gesprengt wurden. Noch am 28. Januar 1985 wurde an der [Bernauer Straße](#) sogar die [Versöhnungskirche](#) gesprengt. Das führte dazu, dass sich letztlich eine breite, nachts taghell beleuchtete Schneise durch die einst dicht bebaute Stadt zog.

Anlagen der Berliner Mauer nach Angaben des Ministeriums für Staatssicherheit im Frühjahr 1989^{[30][31]}

Länge (km)	Anlage
156,40	Grenzbefestigung um West-Berlin zwischen 3,40 und 4,20 m Höhe
111,90	Beton- und Steinmauern
44,50	Metallgitterzaun
112,70	Grenzbefestigung im Bezirk Potsdam
43,70	Grenzbefestigung innerhalb von Ost- und West-Berlin (Sektorengrenze)
0,50	Reste von Häuserfronten, Grundstücksmauern
58,95	Grenzmauer in Plattenbauweise mit einer Höhe von 3,40 m
68,42	Streckmetallzaun mit einer Höhe von 2,90 m als „vorderem Sperrelement“
16100	Lichttrasse
113,85	Grenzsignal- und Sperrzaun (GSSZ)
127,50	Kontakt- und Signalzaun
124,30	Kolonnenweg
Anzahl	Anlage
186	Beobachtungstürme (302 rund um West-Berlin)
31	Führungsstellen
259	Hundelaufanlagen
20	Bunker

Von der 167,8 km langen Grenze um West-Berlin lagen 45,1 km direkt in Ost-Berlin und 112,7 km im ostdeutschen [Bezirk Potsdam](#). Hierbei sind zum Teil die Öffnungen der Grenzübergänge mit enthalten. 63,8 km des Grenzverlaufs lagen in bebautem, 32 km in

bewaldetem und 22,65 km in offenem Gelände, 37,95 km der Grenze lag in oder an Flüssen, Seen und Kanälen.

Für die ostdeutschen Grenzsoldaten galt der Artikel 27 des Grenzgesetzes von 1982, wonach der Einsatz der Schusswaffe zur Verhinderung eines Grenzdurchbruches die äußerste Maßnahme der Gewaltanwendung gegen Personen war. Dies wird meist als [Schießbefehl](#) bezeichnet. Vor hohen Feiertagen oder Staatsbesuchen wurde der Einsatz der Schusswaffe ausdrücklich untersagt, um eine negative Westpresse zu vermeiden. Von West-Berlin wurde die Grenze von der West-Berliner Polizei und alliierten [Militärstreifen](#) beobachtet. Auffällige Aktivitäten wurden dokumentiert; auch um Schleusungen von Ost-Spionen über die Grenze möglichst zu verhindern. Wie sich jedoch später herausstellte, gab es dennoch versteckte Mauerdurchgänge, die auch genutzt wurden.

Aufbau der Grenzanlagen

In ihrem Endausbaustadium – an manchen Stellen erst in den späten 1980er-Jahren – bestanden die sich vollständig auf dem Territorium der DDR bzw. Ost-Berlins befindlichen Grenzanlagen – beginnend aus Richtung DDR bzw. Ost-Berlin – aus:



Grenzabschnitt Liesenstraße mit Tunnel unter Sektorengrenze kreuzender [S-Bahn-Trasse](#) (1980)

- Hinterlandmauer aus Beton oder [Streckmetallzaun](#), etwa zwei bis drei Meter hoch; an vielen Stellen, vor allem im Innenstadtbereich, übernahmen Häuserwände (oft [Brandmauern](#)), die bis in die entsprechende Höhe geweißt waren, die Funktion der Hinterlandmauer,
- am Boden Signalanlagen, die bei Berührung Alarm auslösten,
- Kontaktzaun aus Streckmetall übermannshoch, mit Stachel- und Signaldraht bespannt,
- streckenweise Hundelaufanlagen (scharfe [Schäferhunde](#), an Führungsdraht eingehängt, frei laufend),
- Kraftfahrzeugsperrgräben und Panzersperren ([Tschechenigel](#) aus kreuzweise verschweißten Eisenbahnschienen), die dann als Gegenleistung für bundesdeutsche Milliardenkredite abgebaut wurden,
- Postenstraße/Kolonnenweg, zur Grenzpostenablösung und um Verstärkung heranholen zu können,
- Lichtertrasse zur Ausleuchtung des Kontrollstreifens (an manchen Stellen „östlich“ des Kolonnenwegs),
- Postentürme (1989 insgesamt 302 Stück) mit Suchscheinwerfern, Sichtkontakt der Posten tagsüber, nachts zogen zusätzliche Grenzsoldaten auf,
- Kontrollstreifen (KS), immer frisch geeegt, zur Spurenfeststellung, der auch von den Grenzsoldaten nicht grundlos betreten werden durfte,
- (teilweise extra) übermannshoher Streckmetallzaun, nur schräg durchsehbar,
- Betonfertigteilmauer bzw. -wand nach West-Berlin, 3,75 Meter hoch, (teilweise mit Betonrolle, die beim Überklettern keinen Halt bieten sollte). Als Material dienten landwirtschaftliche Fertigteile wie sie zuvor als Lagerwände für Stallmist Verwendung fanden,^[32]
- davor noch einige Meter Hoheitsgebiet der DDR.



Warnschild „Grenzgebiet“



Blumenschalensperre zur Durchfahrtsicherung an der Ecke Dolomitenstraße und Esplanade
Die Gesamtbreite dieser Grenzanlagen war abhängig von der Häuserbebauung im Grenzgebiet und betrug von etwa 30 Meter bis etwa 500 Meter (am [Potsdamer Platz](#)). [Minenfelder](#) und [Selbstschussanlagen](#) wurden an der Berliner Mauer nicht aufgebaut (dies war aber in der DDR nicht allgemein bekannt), jedoch an der innerdeutschen Grenze zur Bundesrepublik.

Der Aufbau der von den Grenztruppen intern als *Handlungsstreifen* bezeichneten Grenze wurde als Militärgesamtheit behandelt und war den meisten DDR-Bürgern daher nicht genau bekannt. Die Grenzsoldaten waren zum Stillschweigen verpflichtet. Jeder Zivilist, der auffälliges Interesse an Grenzanlagen zeigte, lief mindestens Gefahr, vorläufig festgenommen und zum nächsten Polizeirevier oder Grenzkommando zur Identitätsfeststellung gebracht zu werden. Eine Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Planung eines Fluchtversuchs konnte folgen.

An Stellen, die aufgrund von Bebauung oder Verkehrsführung – beziehungsweise wegen des Geländezuschnitts – schwieriger zu sichern waren, begann das „Grenzgebiet“ auf DDR- und Ost-Berliner Seite schon vor der Hinterlandmauer und war dann Sperrgebiet. Dieses durfte nur mit einer Sondergenehmigung betreten werden. Das bedeutete für Anwohner eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Als „Vorfeldsicherung“ sollten bauliche Maßnahmen (Mauern, Zäune, Gitter, Stacheldraht, Durchfahrtsperren, Übersteigsicherungen), Sichthilfen (Leuchten, weiße Kontrastflächen) und Warnhinweise das unbefugte (beziehungsweise unbemerkte) Betreten oder Befahren dieses Gebietes verhindern. Einblickmöglichkeiten für Unbefugte wurden mit Sichtblenden verbaut.

Im grenznahen Ost-Berliner Stadtgebiet nahe dem [Brandenburger Tor](#), wurde regelmäßig eine [verdeckte](#) sogenannte „Tiefensicherung“ durch zivile Kräfte des Ministeriums für Staatssicherheit durchgeführt, um möglichst frühzeitig und außerhalb der Sichtmöglichkeit des Westteils potentielle Grenzdurchbrüche und besondere Lagen (Demonstrationen oder andere unerwünschte Menschenansammlungen) aufzuklären und zu unterbinden. Ein Gebäude nördlich des Brandenburger Tors wurde von der Hauptabteilung 1 des [MfS](#) genutzt, der zuständigen Abteilung zur Überwachung der Grenztruppen der DDR. Es wurde später abgerissen, um Platz zu schaffen für das [Jakob-Kaiser-Haus](#).

Personeller Aufbau und Ausstattung des Grenzkommandos Mitte

Für den Schutz der Grenze zu West-Berlin war in der DDR das Grenzkommando Mitte der [Grenztruppen der DDR](#) zuständig, dem nach Angaben des MfS vom Frühjahr 1989 11.500 Soldaten und 500 Zivilbeschäftigte angehörten. Es bestand neben dem Stab in [Berlin-Karlshorst](#) aus sieben [Grenzregimentern](#), die in [Treptow](#), [Pankow](#), [Rummelsburg](#), [Hennigsdorf](#), [Groß-](#)

[Glienicke](#), [Potsdam-Babelsberg](#) und [Kleinmachnow](#) stationiert waren, sowie den Grenzausbildungsregimentern GAR-39 in [Wilhelmshagen](#) und GAR-40 in [Oranienburg](#).



Grenzsicherung in [Staaken](#) (1986)

Jedes Grenzregiment besaß fünf direkt geführte Grenzkompanien, außerdem je eine Pionier-, Nachrichten-, Transportkompanie, Granatwerfer- und Artilleriebatterie, einen Aufklärungs- und einen Flammenwerferzug sowie eine Diensthundestaffel und unter Umständen eine Bootskompanie und Sicherungszüge bzw. -kompanien für die Grenzübergangsstellen.

Das Grenzkommando Mitte verfügte über 567 [Schützenpanzerwagen](#), 48 [Granatwerfer](#), 48 [Panzerabwehrkanonen](#) und 114 [Flammenwerfer](#) sowie 156 gepanzerte Fahrzeuge bzw. schwere Pioniertechnik und 2295 Kraftfahrzeuge. Zum Bestand gehörten außerdem 992 Hunde.

An einem normalen Tag waren etwa 2300 Soldaten direkt an der Grenze und im grenznahen Raum eingesetzt. Bei sogenannter „verstärkter Grenzsicherung“, die beispielsweise 1988 wegen politischer Höhepunkte oder schlechter Witterungsbedingungen etwa 80 Tage galt, waren dies etwa 2500 Grenzsoldaten, deren Anzahl in besonderen Situationen weiter aufgestockt werden konnte.

Gewässergrenzen



Reste der ehemaligen Gewässersperre am [Tegeler Fließ](#) im Norden von Berlin

Die äußere Stadtgrenze West-Berlins verlief an mehreren Stellen durch schiffbare Gewässer. Der Grenzverlauf war dort durch eine vom [West-Berliner Senat](#) errichtete Kette aus runden, weißen Bojen mit der (an der Stadtgrenze nicht ganz zutreffenden) Aufschrift „Sektorengrenze“ gekennzeichnet. West-Berliner Fahrgastschiffe und Sportboote mussten darauf achten, sich auf der West-Berliner Seite der Bojenkette zu halten. Auf der DDR-Seite der Grenze wurden diese Gewässer von Booten der [Grenztruppen der DDR](#) patrouilliert.

Die Grenzbefestigungen der DDR befanden sich jeweils auf dem DDR-seitigen Ufer, was teilweise große Umwege erzwang und die Ufer mehrerer [Havelseen](#) „vermauerte“. Der größte Umweg befand sich am [Jungfernsee](#), wo die Mauer bis zu zwei Kilometer vom eigentlichen Grenzverlauf entfernt stand. An mehreren Stellen verlief der Grenzstreifen durch ehemalige Wassergrundstücke und machte sie so für die Bewohner unbrauchbar; so am Westufer des [Groß Glienicker Sees](#) und am Südufer des [Griebnitzsees](#).

Bei den Gewässern an der innerstädtischen Grenze verlief diese überall direkt am westlichen oder östlichen Ufer, so dass dort keine Markierung des Grenzverlaufs im Wasser existierte. Die eigentliche Mauer stand auch hier jeweils am Ost-Berliner Ufer. Dennoch wurden die zu Ost-Berlin gehörenden Gewässer selbst ebenfalls überwacht. Auf Nebenkanälen und -flüssen wurde die Lage dadurch zum Teil unübersichtlich. Manche Schwimmer und Boote aus West-Berlin gerieten versehentlich oder aus Leichtsinn auf Ost-Berliner Gebiet und wurden beschossen. Dabei gab es im Laufe der Jahrzehnte mehrere Tote.

An einigen Stellen in der [Spree](#) gab es Unterwassersperrungen gegen Schwimmer. Für Flüchtlinge war es nicht klar zu erkennen, wann sie West-Berlin erreicht hatten, so dass für sie noch nach dem Überwinden der eigentlichen Mauer die Gefahr bestand, ergriffen zu werden.

Grenzübergänge



Schild an der Sektorengrenze Richtung [Ost-Berlin](#)



Schild Richtung [West-Berlin](#)

An der gesamten Berliner Mauer gab es 25 Grenzübergangsstellen (GÜSt), 13 Straßen-, vier Eisenbahn- und acht Wasserstraßengrenzübergangsstellen. Dies waren etwa 60 % aller Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik bzw. West-Berlin. Für den Straßen-[Transitverkehr](#) gab es nur zwei Berliner Grenzübergänge, indem [Dreilinden](#), bis 1987 [Staaken](#) und danach [Heiligensee](#) benutzt werden konnten.

Die Grenzübergangsstellen waren auf DDR-Seite sehr stark ausgebaut. Es wurde mitunter sehr scharf bei der Ein- und Ausreise von den DDR-Grenzorganen und dem DDR-Zoll kontrolliert. Für die Sicherung und Überwachung des Reiseverkehrs einschließlich Fahndung und Festnahmen an den Grenzübergangsstellen waren die [Passkontrolleinheiten](#) (PKE) der Hauptabteilung VI des [MfS](#) zuständig, die ihren Dienst in Uniformen der [Grenztruppen der DDR](#) versahen. Sie arbeiteten mit den für die äußere Sicherheit und die Verhinderung von Grenzdurchbrüchen zuständigen Einheiten der Grenztruppen und Mitarbeitern der Zollverwaltung, die die Sach- und Personenkontrolle vornahmen, zusammen.^[33]

Auf West-Berliner Seite hatten die Polizei und der Zoll Posten. Dort gab es in der Regel keine Kontrollen im Personenverkehr. Nur an den Transitübergängen wurden die Reisenden statistisch erfasst (Befragung nach dem Ziel), gelegentlich bei entsprechendem Anlass zur Strafverfolgung auch kontrolliert ([Ringfahndung](#)). Der gesamte Güterverkehr unterlag wie im Auslandsverkehr der Zollabfertigung. Beim Güterkraftverkehr war es bei einer westdeutschen Warenanlieferung in Ost-Berlin nicht möglich, von Ost- nach West-Berlin über Grenzübergangsstellen zu fahren, sondern man musste ganz außen herum und einen von den zwei West-Berliner [Transitübergängen](#) benutzen. Das waren [Dreilinden](#) ([BAB 115](#)) und bis 1987 [Staaken](#) ([B 5](#)), danach [Heiligensee](#) über die [BAB 111](#). Demzufolge war es dann eine sogenannte „Ausreise aus der DDR“; bei der Kontrolle wurde der Westdeutsche wie ein ausländischer Lkw sehr gründlich durchsucht. Im Personenverkehr mit der Bundesrepublik wurden von westdeutscher Seite nur statistische Erhebungen gemacht. Beim [Güterverkehr](#) musste über den [Warenbegleitschein](#) der LKW vom Zoll [verplombt](#) und statistisch erfasst werden. Beim Übergang Staaken konnte über die B 5 die einzige Möglichkeit genutzt werden, mit Fahrzeugen durch die DDR zu fahren, die nicht für den Verkehr auf der Autobahn zugelassen waren (z. B. Fahrrad, Moped, Traktor usw.). Allerdings musste die 220 km lange Strecke bei Tageslicht bis [Lauenburg](#) ohne Unterbrechung

(Übernachtung, längere Pausen) bewältigt werden. Mit der Freigabe der Autobahn [A 24](#) im Jahr 1982 wurde der Fahrrad-Transit nicht mehr zugelassen.

Am [Checkpoint Bravo](#) (Dreilinden) und Checkpoint Charlie (Friedrichstraße) hatten die alliierten [Besatzungsmächte](#) Kontrollpunkte eingerichtet, die jedoch nur für Diplomaten und ausländische Staatsangehörige, nicht jedoch für den normalen innerdeutschen Reise- und Besuchsverkehr von Bedeutung waren.

Mit der [Währungsunion](#) am 1. Juli 1990 wurden alle Grenzübergänge aufgegeben. Einige Reste der Anlagen blieben als Mahnmal erhalten.

Kosten

Der Bau, ständige Ausbau und die jahrzehntelange Unterhaltung der schwer bewachten Berliner Mauer war eine große wirtschaftliche Belastung für die DDR. Von den zwischen 1961 bis 1964 insgesamt anfallenden Kosten von 1,822 Milliarden [Mark der DDR](#) für den Aufbau und Betrieb der Grenzanlagen entfielen 400 Millionen Mark (22 %) auf die Berliner Mauer.

Maueropfer und Mauerschützen

Maueropfer

Über die Zahl der *Mauertoten* gibt es stark widersprüchliche Angaben. Sie ist bis heute nicht eindeutig gesichert, weil die Todesfälle an der Grenze von den Verantwortlichen der DDR-Staatsführung systematisch verschleiert wurden. Die Berliner Staatsanwaltschaft gab im Jahre 2000 die Zahl der nachweislich durch einen Gewaltakt an der Berliner Mauer umgekommenen Opfer mit 86 an. Wie schwierig genaue Aussagen auf diesem Gebiet sind, wird auch dadurch deutlich, dass die „[Arbeitsgemeinschaft 13. August](#)“ ihre Zahl der Mauertoten von 2000 bis 2004 von 238 auf 190 korrigiert hat.^[34]

Zwischen Oktober 2005 und Dezember 2007 arbeitete ein vom Verein Berliner Mauer und vom [Zentrum für Zeithistorische Forschung](#) Potsdam getragenes Forschungsprojekt mit dem Ziel, die genaue Zahl der Maueropfer zu ermitteln und die Geschichten der Opfer auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu dokumentieren. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien förderte das Projekt. In der am 7. August 2008 veröffentlichten Bilanz wurde dargelegt, dass von den 374 überprüften Fällen 136 die Kriterien „Maueropfer“ erfüllen. Die Opfer waren vornehmlich fluchtwillige Bürger der DDR (98 der 136 Fälle), unter 30 Jahren (112 Fälle), männlich (128 Fälle) und kamen in den ersten acht Jahren der Mauer (90 Fälle) ums Leben. Weiterhin wurden 48 Fälle identifiziert bei denen Menschen im Umfeld von Kontrollen an Grenzübergängen in Berlin – meist an einem Herzinfarkt – starben. Unter den ausgeschlossenen 159 Fällen sind 19 Fälle, die in anderen Publikationen als Maueropfer geführt werden.^[35]

Nach der Veröffentlichung der Zwischenbilanz kam es zu einer Kontroverse um die Zahl der Opfer und die Methoden der Erforschung der Geschehnisse an der Mauer. Die Arbeitsgemeinschaft 13. August, die damals wieder von 262 Maueropfern ausging, warf dem Forschungsprojekt vor, die Zahl der Opfer aus politischen Gründen bewusst „kleinzurechnen“. Der Arbeitsgemeinschaft, an deren Recherchen keine Historiker beteiligt sind, wurde hingegen vorgeworfen, auf ihren Listen viele Fälle aufzuführen, die ungeklärt seien, nicht nachweislich mit dem Grenzregime im Zusammenhang stünden oder inzwischen sogar widerlegt worden seien.^[36]

Das erste Todesopfer war [Ida Siekmann](#), die am 22. August 1961 beim Sprung aus einem Fenster in der [Bernauer Straße](#) tödlich verunglückte. Die ersten tödlichen Schüsse fielen am 24. August 1961 auf den 24-jährigen [Günter Litfin](#), der am [Humboldthafen](#) von [Transportpolizisten](#) bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. [Peter Fechter](#) verblutete am 17. August 1962 im Todesstreifen an der Zimmerstraße. Im Jahre 1966 wurden zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren im Grenzstreifen durch insgesamt 40 Schüsse getötet. Das letzte Opfer von Todesschüssen an der Mauer war [Chris Gueffroy](#) am 6. Februar 1989. Der letzte tödliche Zwischenfall an der Grenze ereignete sich am 8. März 1989, als [Winfried Freudenberg](#) bei einem Fluchtversuch mit einem defekten Ballon in den Tod stürzte.

Einige Grenzsoldaten starben ebenfalls bei gewalttätigen Vorfällen an der Mauer. Der bekannteste Fall ist die Tötung des Soldaten [Reinhold Huhn](#), der von einem [Fluchthelfer](#) erschossen wurde. Diese Vorfälle wurden von der DDR propagandistisch genutzt und als nachträgliche Begründung für den Mauerbau herangezogen.

Nach Schätzungen mussten sich rund 75.000 Menschen wegen „Republikflucht“ vor DDR-Gerichten verantworten. Republikflucht wurde nach § 213 Strafgesetzbuch der DDR mit Freiheitsstrafen bis zu acht Jahren geahndet. Wer bewaffnet war, Grenzanlagen beschädigte oder als Armeeingehöriger oder Geheimnisträger bei einem Fluchtversuch gefasst wurde, kam selten mit weniger als fünf Jahren Gefängnis davon. Wer Hilfe zur Republikflucht leistete, konnte mit lebenslangem Freiheitsentzug bestraft werden.

Mauerschützen-Prozesse

Die juristische Aufarbeitung des Schießbefehls in sogenannten „Mauerschützenprozessen“ dauerte bis zum Herbst 2004. Zu den angeklagten Verantwortlichen gehörten unter anderem der Staatsratsvorsitzende [Erich Honecker](#), sein Nachfolger [Egon Krenz](#), die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates [Erich Mielke](#), [Willi Stoph](#), [Heinz Keßler](#), [Fritz Streletz](#) und [Hans Albrecht](#), der SED-Bezirkschef von [Suhl](#), sowie einige Generäle, wie der Chef der Grenztruppen (1979–1990), [Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten](#).

Insgesamt kam es in Berlin zu 112 Verfahren gegen 246 Personen, die sich als Schützen oder Tatbeteiligte vor Gericht verantworten mussten. Etwa die Hälfte der Angeklagten wurden [frei gesprochen](#). 132 Angeklagte wurden wegen ihrer Taten oder Tatbeteiligungen zu Freiheits- oder Bewährungsstrafen verurteilt. Darunter waren 10 Mitglieder der SED-Führung, 42 führende Militärs und 80 ehemalige Grenzsoldaten. Dazu kamen 19 Verfahren mit 31 Angeklagten in [Neuruppin](#), die für 19 Todesschützen mit Bewährungsstrafen endeten. Für den [Mord an Walter Kittel](#) wurde der Todesschütze mit der längsten Freiheitsstrafe von 10 Jahren belegt. Im allgemeinen bekamen die Todesschützen Strafen zwischen 6 und 24 Monaten auf Bewährung während die Befehlshabenden mit zunehmender Verantwortung höhere Strafen bekamen.^[37]

Im August 2004 wurden [Hans-Joachim Böhme](#) und Werner Lorenz vom [Landgericht Berlin](#) als ehemalige [Politbüro](#)-Mitglieder zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der letzte Prozess gegen DDR-Grenzsoldaten ging am 9. November 2004 – genau 15 Jahre nach dem Fall der Mauer – mit einem Schuldspruch zu Ende.

Gedenken



Die Skulptur „Leid an der Mauer“ wurde 1965 in [Berlin-Steglitz](#) aufgestellt. Zum Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer wurden sehr unterschiedlich gestaltete Mahnmale errichtet. Kleinere [Kreuze](#) oder andere Zeichen des Gedenkens dienen der Erinnerung an erschossene Flüchtlinge. Sie befinden sich an verschiedenen Stellen der ehemaligen Grenze und gehen meist auf private Initiativen zurück. Eine bekannter Gedenkort sind die [Weißen Kreuze](#) am Spreufer neben dem [Reichstagsgebäude](#).

Über die Art und Weise des Gedenkens gab es wiederholt öffentliche Auseinandersetzungen; so auch Ende der 1990er-Jahre bezüglich der Gedenkstätte in der Bernauer Straße. Einen Höhepunkt erreichte die öffentliche Debatte beim Streit um das in der Nähe des [Checkpoint Charlie](#) errichtete und später geräumte [Freiheitsmahnmal](#). Der [Berliner Senat](#) begegnete dem Vorwurf, kein Gedenkkonzept zu besitzen, mit der Einberufung einer Kommission, die im Frühjahr 2005 Grundzüge eines Gedenkkonzepts vorstellte. Am 20. Juni 2006 legte der Senat

ein daraus entwickeltes integriertes „Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer“ vor, das unter anderem eine Erweiterung der Gedenkstätte an der Bernauer Straße vorsieht.

Im Invalidenpark, zwischen dem [Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung](#) und der *Scharnhorststraße* wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre eine lange Mauer gestaltet, die in einem Wasserbecken versinkt, die der Gartenarchitekt Christoph Girot als [Versunkene Mauer](#) bezeichnet, was einerseits an eine früher hier vorhandene Kirche, andererseits an die *Berliner Mauer* erinnern soll.



Mauermuseum im Haus am Checkpoint Charlie

Das [Mauermuseum](#) am Checkpoint Charlie wurde 1963 direkt vor der Grenze vom Historiker [Rainer Hildebrandt](#) eröffnet und wird von der *Arbeitsgemeinschaft 13. August* betrieben. Es gehört zu den meistbesuchten [Berliner Museen](#). Das Mauermuseum veranschaulicht das Grenzsicherungssystem an der Berliner Mauer und dokumentiert geglückte Fluchtversuche und ihre Fluchtmittel wie Heißluftballons, Fluchtautos, Sessellifte und ein Mini-U-Boot. Heutige Leiterin des Museums ist die Witwe des Gründers, [Alexandra Hildebrandt](#).

Gedenkstättenensemble Berliner Mauer in der Bernauer Straße

Seit Ende der 1990er-Jahre besteht an der [Bernauer Straße](#) zwischen den ehemaligen Bezirken [Wedding](#) und [Mitte](#) ein Gedenkensemble zur Berliner Mauer. Es umfasst die *Gedenkstätte Berliner Mauer*, das *Dokumentationszentrum Berliner Mauer* sowie die [Kapelle der Versöhnung](#).

Die Gedenkstätte ist aus einem vom Bund ausgelobten Wettbewerb hervorgegangen und wurde nach langen und heftigen Diskussionen am 13. August 1998 eingeweiht. Sie stellt einen durch künstlerisch-gestalterische Mittel ergänzten neu aufgebauten Mauerabschnitt am Originalort dar. Das Dokumentationszentrum, das von einem Verein getragen wird, wurde am 9. November 1999 eröffnet. 2003 wurde es durch einen Aussichtsturm ergänzt, von dem die Maueranlagen der Gedenkstätte gut einsehbar sind. Neben einer aktuellen Ausstellung (seit 2001 unter dem Titel *Berlin, 13. August 1961*) gibt es unterschiedliche Informationsmöglichkeiten zur Geschichte der Mauer. Außerdem werden Seminare und andere Veranstaltungen angeboten. Die Kapelle der Versöhnung der Evangelischen Versöhnungsgemeinde wurde am 9. November 2000 eingeweiht. Das Bauwerk ist ein ovaler Stampflehbau und wurde über den Fundamenten des [Chores](#) der 1985 gesprengten Versöhnungskirche errichtet.

Das von [Thomas Flierl](#) erarbeitete „Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer“ sieht vor, die Gedenkstätte in der Bernauer Straße noch zu erweitern und einen Teil des ehemaligen [Stettiner Bahnhofs](#) an der Gartenstraße mit einzubeziehen.

Am 11. September 2008 beschloss das [Abgeordnetenhaus von Berlin](#), zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer am 9. November 2008 die Gedenkstätte Berliner Mauer und die [Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde](#) in der landeseigenen [Stiftung Berliner Mauer](#) zusammenzufassen.

Geschichtsmeile Berliner Mauer

Die *Geschichtsmeile Berliner Mauer* ist eine viersprachige Dauerausstellung, die aus 21 Informationstafeln besteht. Diese stehen über den innerstädtischen Grenzverlauf verteilt und enthalten Fotografien und Texte zu Ereignissen, die sich am Standort der Tafeln zugetragen haben, beispielsweise wird auf geglückte oder missglückte Fluchten hingewiesen. Diese in der Innenstadt schon länger bestehende *Geschichtsmeile Berliner Mauer* wurde 2006 durch weitere Informationstafeln auch im Außenbereich fortgesetzt. ^[38]

Der Mauerstreifen heute Nutzung



Straßenpflaster markieren den Mauerverlauf beim Brandenburger Tor (2004)

Die breite [Trasse](#) zwischen den beiden früheren Mauerlinien wird im heutigen Sprachgebrauch „Grenzstreifen“ oder „Mauerstreifen“ genannt. Er ist noch heute an vielen Stellen gut erkennbar, teilweise durch große [Brachflächen](#) wie an Teilen der Bernauer Straße und zwischen den Stadtteilen Mitte und Kreuzberg entlang der Kommandantenstraße, Alten Jakobstraße, Stallschreiberstraße, Alexandrinenstraße und Sebastianstraße. Andernorts in der zusammenwachsenden Stadt ist der Grenzverlauf hingegen nur noch schwer auszumachen. Die ganze Brutalität der Teilung lässt sich nirgendwo mehr nachvollziehen, auch nicht an Stellen, wo Reste der Mauer konserviert sind.

In der ansonsten dicht bebauten Berliner Innenstadt wurde der Mauerstreifen durch Verkauf und Bebauung meist schnell einer Nachnutzung für städtische Zwecke zugeführt. Daneben gibt es aber auch vielfältige andere Formen der Nachnutzung. Im Ortsteil [Prenzlauer Berg](#) wurde ein Abschnitt zum [Mauerpark](#). Das innerstädtische Stück am östlichen [Teltowkanal](#) wurde mit der [Trasse](#) der [Bundesautobahn 113](#) vom [Berliner Stadtring](#) nach [Schönefeld](#) überbaut.

Der Streit um die Rückgabe der Mauergrundstücke ist indes noch nicht abgeschlossen. Die Eigentümer von Grundstücken auf dem späteren Mauerstreifen waren nach dem Mauerbau [zwangsenteignet](#) und die Bewohner [umgesiedelt](#) worden. Die Frage der Rückgabe und Entschädigung der Betroffenen fand keinen Eingang in den am 31. August 1990 unterzeichneten [Einigungsvertrag](#). Erst das „Gesetz über den Verkauf von Mauer- und Grenzgrundstücken an die früheren Eigentümer (Mauergrundstücksgesetz)“ vom 15. Juli 1996 regelte, dass ein enteigneter Eigentümer sein Objekt nur dann zurück erhält, wenn er dafür 25 % des aktuellen Verkehrswertes bezahlt und der Bund sie nicht für dringende eigene öffentliche Zwecke verwenden oder im öffentlichen Interesse an Dritte veräußern will. In diesem Fall entschädigt der Bund die ehemaligen Eigentümer mit 75 % des Grundstückswertes. ^[39]

Berliner Mauerweg



Ausschilderung des Berliner Mauerweges

Entlang des Mauerstreifens um den gesamten westlichen Teil Berlins verläuft der Berliner Mauerweg. Dieser Rad- und Fußweg entlang der 160 Kilometer langen Trasse der ehemaligen Grenzanlagen ist größtenteils gut ausgebaut und seit 2005 nahezu vollständig. Bis auf kleinere Abschnitte ist die Strecke durchgehend asphaltiert. Der Mauerweg führt überwiegend über noch vorhandene ehemalige Zoll- und Kolonnenwege oder neu angelegte Wege im Grenzstreifen, ansonsten über parallel zur Grenze verlaufende öffentliche Verkehrsflächen.

Reste der Maueranlagen nach dem Abriss

Nur drei Teilstücke der Grenzmauer sind am Originalstandort erhalten geblieben. Alle finden sich im Ortsteil [Mitte](#):

- Der längste erhaltene Abschnitt der Grenzmauer steht an der [Bernauer Straße](#), ist aber durch größere Lücken unterbrochen. Der östliche Teil dieses Mauerabschnitts wurde in die dort errichtete Gedenkstätte integriert und dafür ins ursprüngliche Erscheinungsbild versetzt. [Graffiti](#) und Spuren von Mauerspechten wurden beseitigt.
- Ein fast ebenso langer, nur von einer kleinen Lücke unterbrochener Restabschnitt der Grenzmauer steht an der Niederkirchnerstraße am Ausstellungsgelände der [Topographie des Terrors](#), gegenüber dem [Bundesfinanzministerium](#). Er wurde 1990 unter [Denkmalschutz](#) gestellt.
- Der dritte erhaltene, ebenfalls denkmalgeschützte Abschnitt der Grenzmauer ist nur ca. 15 Meter lang und findet sich an der [Liesenstraße](#).

Deutlich mehr und häufig längere Teilstücke sind von der Hinterlandmauer erhalten geblieben, die den Grenzstreifen auf Ost-Berliner Seite abschloss. Sie liegen zumeist abseits von Straßen und Plätzen und standen daher Bauvorhaben der Nachwendzeit nicht im Wege. Diese Mauerreste sind nur zum Teil denkmalgeschützt.

Erhaltene Abschnitte, an denen die sonst niedrigere Hinterlandmauer die gleiche Höhe wie die Grenzmauer („vorderes Sperrelement“) aufwies, werden heute häufig irrtümlich für Reste der eigentlichen Grenzmauer gehalten. Dies gilt neben Fragmenten der Hinterlandmauer am [Leipziger Platz](#) und der Stresemannstraße auch für den umfangreichsten erhaltenen Mauerabschnitt, der sich mit 1,3 Kilometern Länge parallel zu Mühlenstraße und [Spree](#) vom [Ostbahnhof](#) bis zur [Oberbaumbrücke](#) hinzieht. Dieser Abschnitt der Hinterlandmauer wurde 1990 von internationalen Künstlern zur „[East Side Gallery](#)“ gestaltet und 1991 unter Denkmalschutz gestellt. Eine Grenzmauer gab es an dieser Stelle nicht, da die Grenze hier auf der gegenüberliegenden Spreeseite verlief.

Weitere Reste der Hinterlandmauer finden sich beispielsweise am [Mauerpark](#), entlang der Bernauer Straße, auf dem Gelände des ehemaligen [Stettiner Bahnhofs](#) und auf dem [Invalidenfriedhof](#). Auf einem unbebauten Gelände in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs [Chausseestraße](#) ist ein Abschnitt der Hinterlandmauer mit originalem Zufahrtstor zum Grenzstreifen erhalten geblieben. Mauer und Tor sind allerdings in schlechtem Zustand; sie stehen nicht unter Denkmalschutz.

Von den ehemals 302 Grenzwachtürmen stehen heute noch fünf:

- Eine ehemalige Führungsstelle im Schlesischen Busch in [Treptow](#) in der Nähe der Puschkinallee. Der denkmalgeschützte, 12 Meter hohe Wachturm steht in einem zu einem Park umgewandelten Stück des Mauerstreifens in der Nähe der [Lohmühleninsel](#) ([52° 29' 44,5" N, 13° 27' 2,4" O](#)[52.49569444444413.450666666667](#))^[40],
- in der Kieler Straße in [Mitte](#), nahe dem [Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal](#). Der Turm der früheren Führungsstelle „Kieler Eck“ ist denkmalgeschützt und inzwischen an drei Seiten von Neubauten umgeben. Er beherbergt eine Gedenkstätte, die nach dem Maueropfer [Günter Litfin](#) benannt ist, der im August 1961 am [Humboldthafen](#) erschossen wurde. Die auf Initiative seines Bruders Jürgen Litfin unterhaltene Gedenkstätte kann nach Anmeldung besichtigt werden. ([52° 32' 1,37" N, 13° 22' 9,48" O](#)[52.53371388888913.3693](#)),
- der einzige der deutlich schlankeren Beobachtungstürme (BT-11) in der Erna-Berger-Straße in der Nähe des [Potsdamer Platzes](#) ebenfalls in Mitte. Er wurde allerdings wegen Bauarbeiten um einige Meter versetzt und steht nicht mehr am originalen Standort ([52° 30' 30,7" N, 13° 22' 46,84" O](#)[52.50852777777813.379677777778](#)),
- etwas südlich von [Nieder Neuendorf](#), einem Ortsteil von [Hennigsdorf](#). Hier befindet sich heute die *Ständige Ausstellung zur Geschichte der Grenzanlagen zwischen den beiden deutschen Staaten* ([52° 36' 18,5" N, 13° 11' 58,9" O](#)[52.60513888888913.199694444444](#)),
- bei [Hohen Neuendorf](#). Der Turm befindet sich in einem bereits wieder aufgeforsteten Gebiet des Grenzstreifens ([52° 39' 36,2" N, 13° 17' 59,4" O](#)[52.66005555555613.299833333333](#)). Er wird samt umliegendem Gelände von der [Deutschen Waldjugend](#) genutzt.



Reste der ehemaligen Gewässersperre am [Kindelfließ](#) am Nordrand von Berlin



Mauerrest Niederkirchnerstraße Jahr 2009

Der Berliner Mauerweg führt auch an ehemaligen Gewässersperren vorbei. So kann man an der Grenze zwischen [Glienicke/Nordbahn](#) und Schildow etwas südlich der Alten Hermsdorfer Straße noch die Reste der Sperre am Kindelfließ erkennen. Ebenso finden sich noch Reste der Gewässersperre am Tegeler Fließ zwischen Schildow und Berlin-Lübars.

In den 1990er-Jahren entwickelte sich in der Berliner Politik eine Diskussion darüber, wie der einstige Mauerverlauf im Stadtbild sichtbar gemacht werden könnte. Vorgeschlagen wurden unter anderem eine Doppelreihe in den Straßenbelag eingelassener quadratischer [Pflastersteine](#), ein in den Bodenbelag eingelassenes [Bronzeband](#) und eine Markierung der Grenzmauer und der Hinterlandmauer durch verschiedenfarbige Streifen.

Alle drei Varianten wurden am [Abgeordnetenhaus](#) zu Anschauungszwecken jeweils auf einem kurzen Stück ausgeführt. Als Ergebnis dieser Diskussion wurden vor allem im Innenstadtbereich an mehreren Stellen ungefähr acht Kilometer des Grenzmauerverlaufs durch eine Doppelreihe Pflastersteine markiert. In unregelmäßigen Abständen eingelassene Bronzestreifen tragen die – von der ehemaligen West-Berliner Seite lesbare – einfache Beschriftung „Berliner Mauer 1961–1989“. An herausgehobenen Stellen wie dem [Leipziger Platz](#) wird auf dieselbe Weise auch der Verlauf der Hinterlandmauer gekennzeichnet.

Sonstiges

- Die Straße *Am Sandkrug* in der [brandenburgischen](#) Gemeinde [Glienicke/Nordbahn](#) ragte im Ortsteil [Frohnau](#) im Norden Berlins als schmaler Streifen von Osten nach West-Berlin hinein. Dies führte zu einer speziellen Form im Mauerverlauf, dem sogenannten „[Entenschnabel](#)“.
- Am 1. Juli 1988 kamen durch einen Gebietstausch Teile des [Lenné-Dreiecks](#) zu West-Berlin. Einige West-Berliner, die sich dort auf bis dahin nahezu [exterritorialem Gebiet](#) aufhielten, flüchteten vor der West-Berliner Polizei über die Mauer nach Ost-Berlin. Vorausgegangen war eine Besetzungsaktion auf dem von den Teilnehmern als Norbert-Kubat-Dreieck bezeichneten Gelände. Im Gegenzug fiel z. B. die [Wüste Mark](#) an die DDR.
- Wie überraschend der Mauerbau für die [Deutsche Reichsbahn](#) kam, die in West-Berlin zuständig war, zeigt folgendes Beispiel: Nachts wurden die S-Bahnzüge der DR auf Umlandbahnhöfen, unter anderem im S-Bahnhof Teltow, abgestellt. Beim Mauerbau wurden die Bahngleise gekappt, sodass die Züge bewegungsunfähig waren, da es keine sonstigen Gleisanschlüsse gab. Die herausgetrennten Gleisstücke mussten im Laufe des Tages für kurze Zeit wieder eingesetzt werden, damit die Züge über West-Berlin in ihr Ost-Berliner Betriebswerk überführt werden konnten.

- Anlässlich des Mauerfalls organisierte die [TV-Asahi-Group](#) in [Japan](#) eine Spendenaktion mit dem Ziel, den Grenzstreifen mit einer Kirschbaum-Allee zu verschönern. Bei dieser Aktion kamen rund zwei Millionen [Mark](#) (ca. eine Million Euro) zusammen, mit denen in Berlin und Brandenburg etwa 10.000 [Zierkirschbäume](#) angepflanzt wurden. Tausend davon stehen im ehemaligen Grenzstreifen bei [Teltow-Sigridshorst](#), wo seit 2002 jährlich ein [Kirschblütenfest](#) stattfindet.^{[41][42][43]}
- Am 21. Juli 1990 führte [Roger Waters](#) am [Potsdamer Platz](#), direkt an der gerade gefallenen Mauer, das 1979 erschienene Album „[The Wall](#)“ der Rock-Band [Pink Floyd](#) unter Mitwirkung zahlreicher Stars erneut auf. Das Album beschreibt eine psychologische Mauer und hatte ursprünglich nichts mit der Berliner Mauer zu tun. Dennoch wurden in den Medien angesichts des historischen [Kontextes](#) Zusammenhänge hergestellt, was – auch unter [Marketinggesichtspunkten](#) – von den Veranstaltern begrüßt wurde.
- Die Satirepartei [Die PARTEI](#) zählt den Wiederaufbau der Mauer zu einem ihrer Wahlversprechen. Dabei kann sie sich darauf berufen, dass in verschiedenen Umfragen etwa ein Fünftel der Bevölkerung den Fall der Mauer bedauert.^[44]
- Anlässlich des 20-jährigen Mauerfall-Jubiläums findet 2009 eine symbolische „Mauerreise“ statt. Zwanzig Mauersteine werden von Berlin nach [Israel](#), [Palästina](#), [Korea](#), [Zypern](#), [Jemen](#) und an andere Orte verschickt, wo Teilung und Grenzerfahrung den Alltag prägen. Dort dienen die Steine Künstlern, Intellektuellen und Jugendlichen als Leinwand für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Mauer“.^[45]
- Anlässlich des 20-jährigen Mauerfall-Jubiläums rissen hunderte [Palästinenser](#) ein acht Meter hohes Mauersegment aus der [israelischen Sperranlage](#), die das [Westjordanland](#) und [Ost-Jerusalem](#) teilen.^[46]

Literatur

- Peter Feist: *Die Berliner Mauer*. 4. Aufl. Homilius, Berlin 2004, [ISBN 3-89706-985-7](#) (Der historische Ort, Nr. 38, [Leseprobe](#)).
- Thomas Flemming, Hagen Koch: *Die Berliner Mauer. Geschichte eines politischen Bauwerks*. be.bra, Berlin 2001, [ISBN 3-930863-88-X](#).
- Gerhard Haase-Hindenberg: *Der Mann, der die Mauer öffnete. Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb*. Heyne, München 2007, [ISBN 978-3-453-12713-5](#).
- [Hans-Hermann Hertle](#): *Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989*. 10. Aufl. Links, Berlin 2006, [ISBN 3-86153-113-5](#).
- Hans-Hermann Hertle u. a. (Hrsg.): *Mauerbau und Mauerfall*. Links, Berlin 2002, [ISBN 3-86153-264-6](#).
- Hans-Hermann Hertle, Kathrin Elsner (Hg.) *Der Tag, an dem die Mauer fiel. Die wichtigsten Zeitzeugen berichten vom 9. November 1989*, Nicolai Verlag, [ISBN 978-3-89479-537-5](#).
- Jürgen Rühle, Gunter Holzweißig: *13. August 1961. Die Mauer von Berlin*. 3. Aufl. Edition Deutschland-Archiv, Köln 1988, [ISBN 3-8046-0315-7](#).
- Thomas Scholze, Falk Blask: *Halt! Grenzgebiet! Leben im Schatten der Mauer*. 2. durchges. und erw. Aufl. Basis-Dr., Berlin 1997, [ISBN 3-86163-030-3](#).
- Frederick Taylor: *Die Mauer. 13. August 1961 bis 9. November 1989*. Siedler Verlag, Berlin 2009, [ISBN 978-3-88680-882-3](#).
- Edgar Wolfrum: *Die Mauer. Geschichte einer Teilung*. C.H. Beck Verlag, München 2009, [ISBN 978-3-406-58517-3](#).

Filme

- *Es geschah im August*. Der Bau der Berliner Mauer. Fernsehfilm, Deutschland 2001. (Vorbereitung ab März 1961, Beschlüsse über den Mauerbau, erste Absperrungsmaßnahmen, Vorinformation des Westens, Lucius D. Clay, Fluchten Bernauer Straße, Oberbaumbrücke, Peter Fechter).